

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan

6.1.1. Strategi Pembangunan Daerah

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsip sebagai pelayan masyarakat.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan yang akan dijelaskan lebih lanjut.

Dalam menentukan strategi pembangunan daerah tidak serta merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah antara lain:

1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan);
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;

4. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memperhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan.

Penentuan alternatif strategi untuk pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran dirumuskan dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas yang telah diuraikan dan dirumuskan dalam bab-bab sebelumnya. Guna lebih mempertajam dan memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaannya, maka strategi umum pembangunan tersebut dirinci lagi kedalam strategi dan sasaran pembangunan, seperti yang tercantum dalam tabel dibawah ini.

Tabel 6.1.
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Jambi

VISI : Menjadikan Kota Jambi Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Berbasis Masyarakat Berakhlak Dan Berbudaya dengan Mengedepankan Pelayanan Prima

Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1 : Penguatan birokrasi dan Meningkatkan pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi		
T.1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	S1. Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Pengembangan infrastruktur dan aplikasi TIK
		Peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur
		Peningkatan transparansi kinerja instansi pemerintah
		Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dari KKN
		Menyelenggarakan Pelayanan Publik Berbasis TIK
Misi 2 : Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat		
T.2. Meningkatnya Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	S.2. Optimalisasi Penegakan Produk Hukum Daerah	Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan regulasi daerah
	S.3. Meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan	Peningkatan manajemen logistik dan pelayanan kebakaran
T.3. Mewujudkan stabilitas daerah yang kondusif dan aman	S.4. Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat	Membangun dan memfasilitasi masyarakat dalam kerangka Konesus dasar bangsa
	S5. Meningkatkan peranan organisasi kemasyarakatan dan parpol dalam pembangunan	Membina, memberdayakan memfasilitas orkemas dan parpol
Misi 3 : Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan		
T.4. Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	S.6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perhubungan	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perhubungan perkotaan
	S.7. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni	Peningkatan Kualitas Perumahan dan Lingkungan Permukiman yang berkelanjutan
	S.8. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan	Peningkatan sarana dan prasarana serta pengelolaan air bersih, air limbah dan bangunan
		Peningkatan infrastruktur jalan yang mantap
		Peningkatan harmonisasi ruang kota

Perubahan RPJMD Kota Jambi 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Strategi
	S.9. Penurunan Luasan Kawasan Genangan	Peningkatan sistem jaringan drainase dan perlindungan retensi
	S.10. Meningkatkan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peningkatan sinergisitas penanganan titik genangan Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan
Misi 4 : Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan		
T.5. Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	S.11. Pengendalian Laju Inflasi Kota Jambi	Penguatan pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan
	S.12. Meningkatnya Ketahanan Pangan	Meningkatkan Ketahanan Pangan
	S.13. Meningkatkan Aktivitas Pariwisata	Penguatan daya saing kepariwisataan
	S.14. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	S.15. Meningkatkan Realisasi Investasi	Peningkatan Iklim Investasi
	S.16. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	Peningkatan peluang kerja pada usia produktif serta perluasan lapangan usaha Sinergitas hubungan antar stakeholder ketenagakerjaan
	S.17. Meningkatkan Daya Saing Usaha Skala mikro dan Kecil	Peningkatan daya saing usaha mikro kecil untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif Mendorong Terciptanya Produktivitas IKM
Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan		
T.6. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	S.18. Meningkatkan Derajat Kesehatan	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat (universal healthcare)
		Peningkatan Akses Kesehatan Terhadap Miskin yang Tepat Sasaran
	S.19. Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Peningkatan akses mutu dan tata kelola pendidikan dasar
		Peningkatan Akses Pendidikan Terhadap Miskin yang Tepat Sasaran
	S.20. Mengendalikan Angka Kelahiran Penduduk	Peningkatan Akses dan Pelayanan Keluarga Berencana yang Berkualitas
	S.21. Meningkatkan Kesetaraan Gender	Peningkatan Pengarusutamaan Gender
	S.22. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	Peningkatan pemenuhan hak anak
	S.23. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Peningkatan pembinaan, movev pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
	S.24. Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan	Peningkatan partisipasi generasi muda dalam pembangunan
	S.25. Menurunkan angka PMKS	Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan terhadap PMKS

6.1.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah dan perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Setiap pernyataan arah kebijakan dirumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu. Dengan adanya penentuan horison waktu pencapaian arah kebijakan, secara logis kapan suatu arah kebijakan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya. Urut-urutan arah kebijakan dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun untuk penyusunan RPJMD. Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun periode atau dapat pula membutuhkan lebih dari satu tahun. Namun, yang terpenting keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang padu dan mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintahan daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada.

Guna mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka pelaksanaan prioritas pembangunan harus fokus dan terarah dengan jelas. Untuk itu diperlukan arah kebijakan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan dalam horizon waktu yang dituangkan dalam tema pembangunan pada setiap tahun yang akan dijabarkan dalam dokumen rencana kerja pemerintah daerah.

Adapun arah kebijakan dalam horizon waktu atau tema pembangunan tahunan disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.1.2.
Arah Kebijakan

TEMA PEMBANGUNAN				
TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas (Perpres 72 tahun 2018)	Peningkatan SDM untuk pelayanan Prima berbasis TIK	Peningkatan Akses Mutu Layanan dan Kesejahteraan Masyarakat serta Pemulihan Ekonomi	Peningkatan Daya Saing dan Pariwisata Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Daerah	Pemantapan Pelayanan Publik Selaras Dengan Peningkatan Perdagangan Dan Jasa Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Yang Berbasis Ekonomi Kreatif, Inklusif Dan Berkelanjutan
ARAH KEBIJAKAN				
Meningkatkan ketatalaksanaan pemerintahan yang berbasis TIK	Meningkatkan ketatalaksanaan pemerintahan yang berbasis TIK	Meningkatkan ketatalaksanaan pemerintahan yang berbasis TIK	Optimalisasi ketatalaksanaan pemerintahan yang berbasis TIK	Optimalisasi ketatalaksanaan pemerintahan yang berbasis TIK
Meningkatkan kompetensi dan integritas ASN	Meningkatkan kompetensi dan integritas ASN	Meningkatkan kompetensi dan integritas ASN	Meningkatkan kompetensi dan integritas ASN	Meningkatkan kompetensi dan integritas ASN
Meningkatkan Akuntabilitas kinerja keuangan daerah	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja keuangan daerah	Mengoptimalkan Akuntabilitas kinerja keuangan daerah	Mengoptimalkan Akuntabilitas kinerja keuangan daerah	Mengoptimalkan Akuntabilitas kinerja keuangan daerah
Meningkatkan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan	Meningkatkan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan	Mengoptimalkan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan	Mengoptimalkan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan	Mengoptimalkan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan
Meningkatkan pengawasan pembangunan secara komprehensif, transparan dan akuntabel	Meningkatkan pengawasan pembangunan secara komprehensif, transparan dan akuntabel	Meningkatkan pengawasan pembangunan secara komprehensif, transparan dan akuntabel	Meningkatkan pengawasan pembangunan secara komprehensif, transparan dan akuntabel	Meningkatkan pengawasan pembangunan secara komprehensif, transparan dan akuntabel
Meningkatkan Koordinasi, Fasilitasi dan kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan Koordinasi, Fasilitasi dan kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan Koordinasi, Fasilitasi dan kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan Koordinasi, Fasilitasi dan kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan Koordinasi, Fasilitasi dan kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan

TEMA PEMBANGUNAN				
TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas (Perpres 72 tahun 2018)	Peningkatan SDM untuk pelayanan Prima berbasis TIK	Peningkatan Akses Mutu Layanan dan Kesejahteraan Masyarakat serta Pemulihan Ekonomi	Peningkatan Daya Saing dan Pariwisata Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Daerah	Pemantapan Pelayanan Publik Selaras Dengan Peningkatan Perdagangan Dan Jasa Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Yang Berbasis Ekonomi Kreatif, Inklusif Dan Berkelanjutan
ARAH KEBIJAKAN				
Meningkatkan cakupan pelayanan publik berbasis TIK	Meningkatkan cakupan pelayanan publik berbasis TIK	Meningkatkan cakupan pelayanan publik berbasis TIK	Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis TIK	Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis TIK
Meningkatkan perlindungan, penyelamatan arsip dan sistem informasi kearsipan daerah	Meningkatkan perlindungan, penyelamatan arsip dan sistem informasi kearsipan daerah	Meningkatkan perlindungan, penyelamatan arsip dan sistem informasi kearsipan daerah	Meningkatkan perlindungan, penyelamatan arsip dan sistem informasi kearsipan daerah	Meningkatkan perlindungan, penyelamatan arsip dan sistem informasi kearsipan daerah
Meningkatkan pengawasan dan pengendalian masyarakat terhadap kepatuhan perda	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian masyarakat terhadap kepatuhan perda	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian masyarakat terhadap kepatuhan perda	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian masyarakat terhadap kepatuhan perda	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian masyarakat terhadap kepatuhan perda
Meningkatkan sistem manajemen logistik kebencanaan	Meningkatkan sistem manajemen logistik kebencanaan	Meningkatkan sistem manajemen logistik kebencanaan	Meningkatkan sistem manajemen logistik kebencanaan	Meningkatkan sistem manajemen logistik kebencanaan
Meningkatkan karakter, ideologi dan wawasan kebangsaan serta peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatkan karakter, ideologi dan wawasan kebangsaan serta peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatkan karakter, ideologi dan wawasan kebangsaan serta peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatkan karakter, ideologi dan wawasan kebangsaan serta peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatkan karakter, ideologi dan wawasan kebangsaan serta peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
meningkatkan pembinaan pemberdayaan fasilitas orkemas dan parpol	meningkatkan pembinaan pemberdayaan fasilitas orkemas dan parpol	meningkatkan pembinaan pemberdayaan fasilitas orkemas dan parpol	meningkatkan pembinaan pemberdayaan fasilitas orkemas dan parpol	meningkatkan pembinaan pemberdayaan fasilitas orkemas dan parpol
Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan	Mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan	Mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan

TEMA PEMBANGUNAN				
TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas (Perpres 72 tahun 2018)	Peningkatan SDM untuk pelayanan Prima berbasis TIK	Peningkatan Akses Mutu Layanan dan Kesejahteraan Masyarakat serta Pemulihan Ekonomi	Peningkatan Daya Saing dan Pariwisata Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Daerah	Pemantapan Pelayanan Publik Selaras Dengan Peningkatan Perdagangan Dan Jasa Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Yang Berbasis Ekonomi Kreatif, Inklusif Dan Berkelanjutan
ARAH KEBIJAKAN				
Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas
Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air bersih, air limbah dan Bangunan	Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air bersih, air limbah dan Bangunan	Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air bersih, air limbah dan Bangunan	Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air bersih, air limbah dan Bangunan	Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air bersih, air limbah dan Bangunan
Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan yang berkondisi baik	Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan yang berkondisi baik	Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan yang berkondisi baik	Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan yang berkondisi baik	Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan yang berkondisi baik
Menurunkan jumlah titik genangan perkotaan	Menurunkan jumlah titik genangan perkotaan	Menurunkan jumlah titik genangan perkotaan	Menurunkan jumlah titik genangan perkotaan	Menurunkan jumlah titik genangan perkotaan
Meningkatkan sinergitas pembangunan infrastruktur	Meningkatkan sinergitas pembangunan infrastruktur	Meningkatkan sinergitas pembangunan infrastruktur	Meningkatkan sinergitas pembangunan infrastruktur	Meningkatkan sinergitas pembangunan infrastruktur
Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang	Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang	Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang	Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang	Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang
Meningkatkan manajemen pengendalian dan pengelolaan persampahan	Meningkatkan manajemen pengendalian dan pengelolaan persampahan	Meningkatkan manajemen pengendalian dan pengelolaan persampahan	Mengoptimalkan pengelolaan persampahan	Mengoptimalkan pengelolaan persampahan

TEMA PEMBANGUNAN				
TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas (Perpres 72 tahun 2018)	Peningkatan SDM untuk pelayanan Prima berbasis TIK	Peningkatan Akses Mutu Layanan dan Kesejahteraan Masyarakat serta Pemulihan Ekonomi	Peningkatan Daya Saing dan Pariwisata Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Daerah	Pemantapan Pelayanan Publik Selaras Dengan Peningkatan Perdagangan Dan Jasa Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Yang Berbasis Ekonomi Kreatif, Inklusif Dan Berkelanjutan
ARAH KEBIJAKAN				
Mendorong partisipasi masyarakat untuk pengurangan tingkat pencemaran lingkungan	Meningkatkan perlindungan, pengendalian dan pengawasan lingkungan	Meningkatkan perlindungan, pengendalian dan pengawasan lingkungan	Meningkatkan perlindungan, pengendalian dan pengawasan lingkungan	Meningkatkan perlindungan, pengendalian dan pengawasan lingkungan
Pengendalian dan pengawasan lingkungan				
Peningkatan dan pengelolaan tutupan lahan binaan				
Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan
Meningkatkan manajemen pengelolaan perpasaran	Meningkatkan manajemen tataniaga	Meningkatkan manajemen tataniaga	Mengoptimalkan manajemen tataniaga	Mengoptimalkan manajemen tataniaga
Meningkatkan pengawasan dan pengendalian harga	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian harga	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian harga	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian harga	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian harga
Pengendalian ketersediaan dan distribusi bahan pangan	Pengendalian ketersediaan dan distribusi bahan pangan	Pengendalian ketersediaan dan distribusi bahan pangan	Pengendalian ketersediaan dan distribusi bahan pangan	Pengendalian ketersediaan dan distribusi bahan pangan
Meningkatkan keamanan konsumsi pangan masyarakat perkotaan	Meningkatkan keamanan konsumsi pangan masyarakat perkotaan	Meningkatkan keamanan konsumsi pangan masyarakat perkotaan	Meningkatkan keamanan konsumsi pangan masyarakat perkotaan	Meningkatkan keamanan konsumsi pangan masyarakat perkotaan

TEMA PEMBANGUNAN				
TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas (Perpres 72 tahun 2018)	Peningkatan SDM untuk pelayanan Prima berbasis TIK	Peningkatan Akses Mutu Layanan dan Kesejahteraan Masyarakat serta Pemulihan Ekonomi	Peningkatan Daya Saing dan Pariwisata Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Daerah	Pemantapan Pelayanan Publik Selaras Dengan Peningkatan Perdagangan Dan Jasa Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Yang Berbasis Ekonomi Kreatif, Inklusif Dan Berkelanjutan
ARAH KEBIJAKAN				
Meningkatkan kreatifitas seni budaya dan pengelolaan peninggalan budaya	Meningkatkan kreatifitas seni budaya dan pengelolaan peninggalan budaya	Meningkatkan kreatifitas seni budaya dan pengelolaan peninggalan budaya	Meningkatkan kreatifitas seni budaya dan pengelolaan peninggalan budaya	Meningkatkan kreatifitas seni budaya dan pengelolaan peninggalan budaya
Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan MICE (<i>Meeting, Incentive, Convention, Exhibition</i>)	Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan MICE (<i>Meeting, Incentive, Convention, Exhibition</i>)	Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan MICE (<i>Meeting, Incentive, Convention, Exhibition</i>)	Mendorong aktivitas MICE (<i>Meeting, Incentive, Convention, Exhibition</i>)	Mendorong aktivitas MICE (<i>Meeting, Incentive, Convention, Exhibition</i>)
Mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah	Mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah	Mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah	Mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah	Mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah
Mengoptimalkan pengelolaan penerimaan retribusi daerah	Mengoptimalkan pengelolaan penerimaan retribusi daerah	Mengoptimalkan pengelolaan penerimaan retribusi daerah	Mengoptimalkan pengelolaan penerimaan retribusi daerah	Mengoptimalkan pengelolaan penerimaan retribusi daerah
Meningkatkan Kemudahan Perizinan dan Promosi Investasi	Meningkatkan Kemudahan Perizinan dan Promosi Investasi	Meningkatkan Kemudahan Perizinan dan Promosi Investasi	Meningkatkan Kemudahan Perizinan dan Promosi Investasi	Meningkatkan Kemudahan Perizinan dan Promosi Investasi
Mendorong kewirausahaan untuk angkatan kerja produktif	Mendorong kewirausahaan untuk angkatan kerja produktif	Mendorong kewirausahaan dan kompetensi tenaga kerja	Mendorong kewirausahaan dan kompetensi tenaga kerja	Mendorong kewirausahaan dan kompetensi tenaga kerja
Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja			

TEMA PEMBANGUNAN				
TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas (Perpres 72 tahun 2018)	Peningkatan SDM untuk pelayanan Prima berbasis TIK	Peningkatan Akses Mutu Layanan dan Kesejahteraan Masyarakat serta Pemulihan Ekonomi	Peningkatan Daya Saing dan Pariwisata Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Daerah	Pemantapan Pelayanan Publik Selaras Dengan Peningkatan Perdagangan Dan Jasa Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Yang Berbasis Ekonomi Kreatif, Inklusif Dan Berkelanjutan
ARAH KEBIJAKAN				
Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis
Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan ekonomi kreatif	Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan ekonomi kreatif	Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan ekonomi kreatif	Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan ekonomi kreatif	Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan ekonomi kreatif
Meningkatkan proteksi, pengembangan dan pemasaran produk lokal	Meningkatkan proteksi, pengembangan dan pemasaran produk lokal	Meningkatkan proteksi, pengembangan dan pemasaran produk lokal	Meningkatkan pemasaran produk lokal	Meningkatkan pemasaran produk lokal
Meningkatkan koperasi berkualitas	Penguatan Kelembagaan Koperasi	Penguatan Kelembagaan Koperasi	Pengembangan Koperasi	Pengembangan Koperasi
Meningkatkan sarana prasarana kesehatan	Meningkatkan sarana prasarana kesehatan	Meningkatkan sarana prasarana kesehatan	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
Kartu Jambi Bugar	Kartu Jambi Bugar	Kartu Jambi Bugar	Kartu Jambi Bugar	Kartu Jambi Bugar
Meningkatkan sarana prasarana pendidikan	Meningkatkan sarana prasarana pendidikan	Meningkatkan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas	Meningkatkan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas	Meningkatkan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas
Menekan angka putus sekolah	Mengembangkan pola pembiayaan pendidikan	Mengembangkan pola pembiayaan pendidikan	Mengembangkan pola pembiayaan pendidikan	Mengembangkan pola pembiayaan pendidikan
	Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik	Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik	Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik	Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik

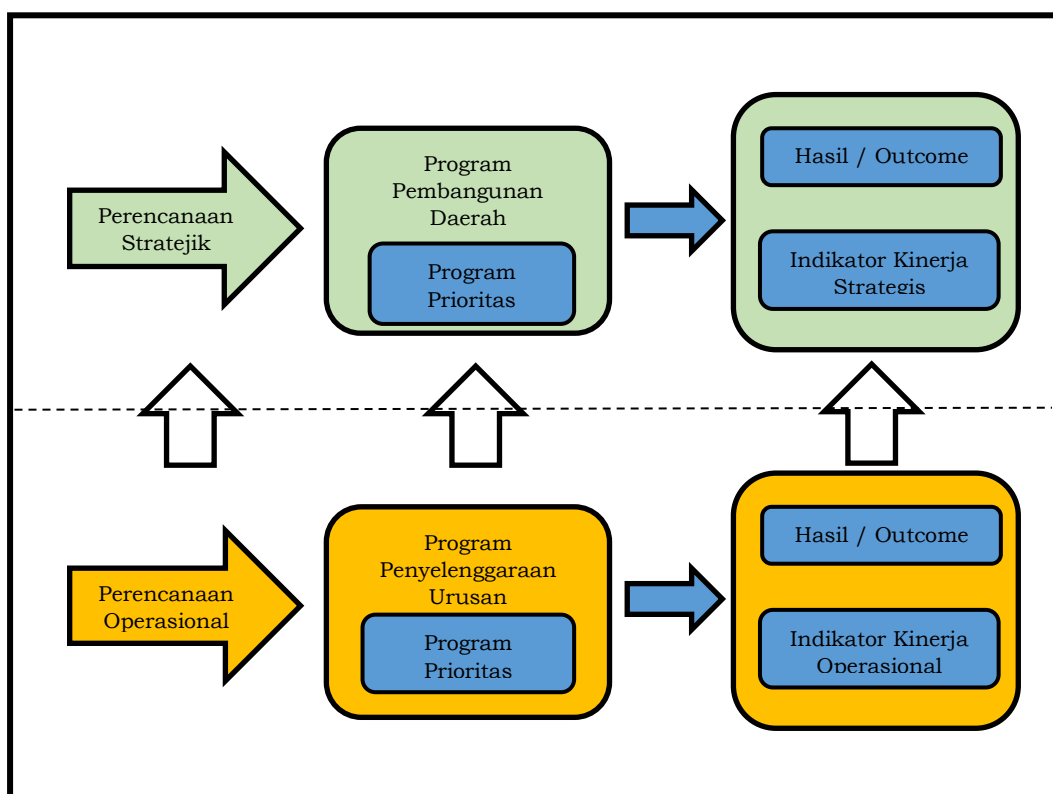
TEMA PEMBANGUNAN				
TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas (Perpres 72 tahun 2018)	Peningkatan SDM untuk pelayanan Prima berbasis TIK	Peningkatan Akses Mutu Layanan dan Kesejahteraan Masyarakat serta Pemulihan Ekonomi	Peningkatan Daya Saing dan Pariwisata Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Daerah	Pemantapan Pelayanan Publik Selaras Dengan Peningkatan Perdagangan Dan Jasa Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Yang Berbasis Ekonomi Kreatif, Inklusif Dan Berkelanjutan
ARAH KEBIJAKAN				
Kartu Jambi Cerdas	Kartu Jambi Cerdas	Kartu Jambi Cerdas	Kartu Jambi Cerdas	Kartu Jambi Cerdas
Meningkatkan minat baca masyarakat perkotaan	Meningkatkan minat baca masyarakat perkotaan	Meningkatkan minat baca masyarakat perkotaan	Meningkatkan minat baca masyarakat perkotaan	Meningkatkan minat baca masyarakat perkotaan
Meningkatkan Akses Pelayanan Keluarga Berencana, Pembinaan Ketahanan dan Pembangunan Keluarga	Meningkatkan Akses Pelayanan Keluarga Berencana, Pembinaan Ketahanan dan Pembangunan Keluarga	Meningkatkan Akses Pelayanan Keluarga Berencana, Pembinaan Ketahanan dan Pembangunan Keluarga	Meningkatkan Akses Pelayanan Keluarga Berencana, Pembinaan Ketahanan dan Pembangunan Keluarga yang berkualitas	Meningkatkan Akses Pelayanan Keluarga Berencana, Pembinaan Ketahanan dan Pembangunan Keluarga yang berkualitas
Meningkatkan partisipasi dan perlindungan terhadap perempuan	Meningkatkan partisipasi dan perlindungan terhadap perempuan	Meningkatkan partisipasi dan perlindungan terhadap perempuan	Meningkatkan partisipasi dan perlindungan terhadap perempuan	Meningkatkan partisipasi dan perlindungan terhadap perempuan
Meningkatkan akses perempuan terhadap sumberdaya pembangunan	Meningkatkan akses perempuan terhadap sumberdaya pembangunan	Meningkatkan akses perempuan terhadap sumberdaya pembangunan	Mengoptimalkan peran perempuan terhadap pembangunan	Mengoptimalkan peran perempuan terhadap pembangunan
Meningkatkan pemenuhan hak anak	Meningkatkan pemenuhan hak anak	Meningkatkan pemenuhan hak anak	Mengoptimalkan pemenuhan hak anak	Mengoptimalkan pemenuhan hak anak
Meningkatkan pembinaan dan monev pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan pembinaan dan monev pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan pembinaan dan monev pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Mengoptimalkan pembinaan dan monev pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Mengoptimalkan pembinaan dan monev pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan

TEMA PEMBANGUNAN				
TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas (Perpres 72 tahun 2018)	Peningkatan SDM untuk pelayanan Prima berbasis TIK	Peningkatan Akses Mutu Layanan dan Kesejahteraan Masyarakat serta Pemulihan Ekonomi	Peningkatan Daya Saing dan Pariwisata Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Daerah	Pemantapan Pelayanan Publik Selaras Dengan Peningkatan Perdagangan Dan Jasa Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Yang Berbasis Ekonomi Kreatif, Inklusif Dan Berkelanjutan
ARAH KEBIJAKAN				
Meningkatkan pembinaan olahraga dan pengembangan kepemudaan	Meningkatkan pembinaan olahraga dan pengembangan kepemudaan	Mengembangkan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga	Mengembangkan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga	Mengembangkan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga
		Meningkatkan prestasi atlit dan pemuda	Meningkatkan prestasi atlit dan pemuda	Meningkatkan prestasi atlit dan pemuda
Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan kepada PMKS	Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan kepada PMKS	Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan kepada PMKS	Mengoptimalkan pemberdayaan dan pembinaan kepada PMKS	Mengoptimalkan pemberdayaan dan pembinaan kepada PMKS
Meningkatkan perlindungan sosial terhadap PMKS	Meningkatkan perlindungan sosial terhadap PMKS	Meningkatkan perlindungan sosial terhadap PMKS	Meningkatkan perlindungan sosial terhadap PMKS	Meningkatkan perlindungan sosial terhadap PMKS

6.2. Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

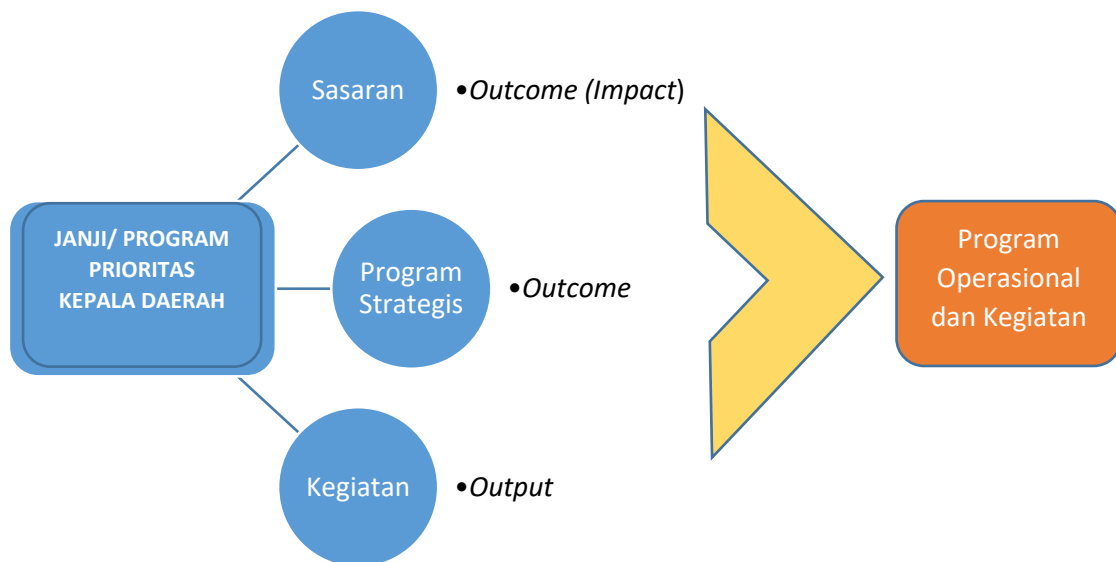
Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Suatu program prioritas bersifat strategis mengikuti diagram kinerja pembangunan sebagaimana gambar berikut:



Gambar 6.1.
Arsitektur Perencanaan Kinerja Pembangunan Daerah

Sesuai arsitektur perencanaan dan kinerja tersebut di atas, perencanaan dipisahkan antara aspek strategis dan operasional, program dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program untuk perencanaan strategis dan program untuk perencanaan

operasional. Dalam hal program didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional, yang demikian karena urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena memiliki pengaruh yang sangat luas dan *urgent*. Program strategis selanjutnya disebut dengan program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah pada intinya merupakan implementasi dari janji-janji dan program prioritas serta agenda politik kepala daerah terpilih yang diusung pada waktu kampanye. Sesuai dengan kaidah perencanaan dan pengukuran kinerja, janji dan program prioritas kepala daerah terpilih diimplementasi dalam tataran sasaran, program dan kegiatan yang mempunyai tingkatan indikator sasaran (*outcome/impact*), program (*outcome*) atau kegiatan (*output*) yang dilaksanakan dalam bentuk program operasional dan kegiatan di perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya, sebagaimana ilustrasi gambar berikut ini :



Gambar 6.2.
Ilustrasi Implementasi Janji/Program Prioritas Kepala Daerah

Program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Program Prioritas Pembangunan

1. *Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan*

Infrastruktur merupakan aspek penting dalam upaya penyediaan ruang kota yang harmonis, baik dalam meningkatkan kenyamanan bagi

kehidupan sosial masyarakat, mendorong kemajuan kegiatan perekonomian daerah serta dapat memberikan perlindungan maupun perbaikan/recovery terhadap degradasi lingkungan guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Adapun pembangunan infrastruktur ini dilaksanakan melalui perluasan dan peningkatan kualitas layanan infrastruktur dasar, penataan Kawasan strategis guna mendorong potensi ekonomi, penyediaan ruang publik serta penyediaan/penataan fungsi-fungsi konservasi lingkungan yang di dukung penyediaan sarana dan prasarana perkotaan. Termasuk di dalamnya penyediaan transportasi publik yang didukung jaringan transportasi dalam kota maupun daerah *hinterland* dalam suatu keterpaduan pembangunan dalam perspektif pembangunan regional.

2. *Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia*

Salah satu prioritas pembangunan Pemerintah Kota Jambi ialah peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat, karena keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan tetapi yang paling penting adalah keberhasilan pembangunan manusianya, sehingga nantinya dapat terwujud manusia yang kompeten dan mandiri.

Prioritas Pengembangan SDM ini akan menjadi perhatian dari setiap Perangkat Daerah baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. Pengembangan yang dilakukan antara lain Pengembangan SDM Aparatur Pemerintah maupun pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja/pelaku UMKM melalui pelatihan kerja yang terencana agar peningkatan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan sikap kerja (attitude) dapat dilakukan. Diharapkan dengan adanya peningkatan kapasitas dasar penduduk akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.

3. *Penguatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan*

Permasalahan kemiskinan bukan hanya merupakan masalah ekonomi semata, akan tetapi juga merupakan masalah sosial dan kemanusiaan. Oleh karena itu, implikasi permasalahan kemiskinan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia secara keseluruhan, yang pada

akhirnya akan menentukan kelangsungan pembangunan kualitas manusia itu sendiri yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Dalam kaitan proses perkembangan dinamika kehidupan masyarakat, maka masalah kemiskinan dipandang sebagai masalah yang sangat dinamis, sehingga membutuhkan peran institusi, program serta metode pendekatan yang mampu menjawab permasalahan kemiskinan.

Beberapa permasalahan yang ditemukan dalam implementasi penanggulangan kemiskinan yaitu:

- a) Masih lemahnya koordinasi terutama dalam hal: pendataan, pendanaan, dan kelembagaan;
- b) Lemahnya koordinasi antar program-program penanggulangan kemiskinan antara instansi pemerintah pusat dan daerah;
- c) Lemahnya integrasi program pada tahap perencanaan, sinkronisasi program pada tahap pelaksanaan, dan sinergi antar pelaku (pemerintah, dunia usaha, masyarakat madani);
- d) Belum optimalnya kelembagaan di pemerintah, dunia usaha, LSM, dan masyarakat madani dalam bermitra dan bekerjasama dalam penanggulangan kemiskinan serta penciptaan lapangan kerja.

Dengan dimensinya yang luas dan kompleks, kemiskinan perlu ditangani secara komprehensif dan sistemik. Pemecahan masalah kemiskinan juga tidak lagi dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri melalui kebijakan yang terpusat dan berjangka pendek, melainkan memerlukan pendekatan yang terpadu, terencana, berkesinambungan, dan menuntut keterlibatan berbagai pihak.

4. *Pengembangan Pariwisata dan Promosi Daerah*

Apabila melihat tren dan menganalisis berbagai sektor ekonomi, maka sektor pariwisata menjadi sektor yang paling memiliki potensi besar untuk dijadikan sebagai andalan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Setiap tahun performa pariwisata Indonesia terus menanjak, sektor ini terus tumbuh dan bergerak lincah dalam peningkatan ekonomi Indonesia.

Potensi pengembangan pariwisata di Kota Jambi juga telah dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal. Berbagai pembangunan fisik maupun non fisik dilakukan dalam rangka pengembangan pariwisata di Kota Jambi seperti pengembangan Danau Sipin sebagai kawasan wisata terpadu,

perbaikan infrastruktur publik, pembangunan berbagai fasilitas umum dan juga perbaikan sistem pelayanan publik yang pada akhirnya akan mengakselerasi aktivitas ekonomi masyarakat.

Konsep pengembangan pariwisata di Kota Jambi kedepannya adalah pengembangan pariwisata berbasis penataan kawasan, diantaranya adalah penataan kawasan Pasar Kota Jambi, pembangunan kawasan wisata Jambi Kota Seberang yang memiliki potensi wisata alam dan juga wisata budaya.

Selain sebagai ibu kota Provinsi Jambi, Kota Jambi juga merupakan daerah strategis sebagai pintu masuk dan perlintasan ke daerah lainnya, baik perlintasan antar kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi maupun perlintasan antar provinsi. Hal ini tentu juga akan memberi banyak manfaat bagi pengembangan pariwisata di Kota Jambi, terutama bidang perhotelan, restoran, transportasi dan penyelenggaraan aktivitas MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*).

Ketika promosi dan akomodasi transportasi berjalan seirama, tentu diperlukan perhatian yang cukup intensif terhadap kualitas objek wisata dan keramahan tuan rumah itu sendiri. Inovasi paket wisata dan berbagai kreativitas lainnya juga harus digerakkan berkesinambungan. Selain itu, juga dibutuhkan sinergitas semua stakeholder terkait dalam pengembangan pariwisata di Kota Jambi. Hal lain yang tidak boleh dilupakan adalah peran masyarakat pengguna teknologi untuk memaksimalkan promosi sektor pariwisata di Kota Jambi. Kombinasi apik antara perkembangan teknologi, pariwisata, serta keramahan budaya akan menjadi nilai tambah bagi pengembangan aktivitas kepariwisataan.

Apabila aktivitas kepariwisataan mampu dikelola dengan baik dan diorganisasi dengan manajemen yang sehat, maka hal ini tentu akan meningkatkan promosi daerah Kota Jambi di level nasional maupun internasional. Dengan demikian, peningkatan investasi di Kota Jambi pun juga akan tumbuh, dan selanjutnya akan berdampak pada peningkatan lapangan usaha dan pengurangan pengangguran. Muaranya tentu adalah perbaikan struktur dan peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Jambi.

2. Janji Politik Kepala Daerah

1. Peningkatan Implementasi IT Dalam Pengelolaan Perkotaan Dan Pemerintahan
2. Jambi Cerdas
3. Jambi Bugar
4. Kota Layak Anak
5. Kegiatan Khusus Lansia
6. Perluasan Layanan Kesehatan 119
7. Peningkatan Jumlah Dan Kualitas PKM Rawat Inap
8. Pelayanan Prima Perizinan
9. Peningkatan Frekuensi Job Fair
10. Kepastian Hukum
11. Peningkatan SDM Dan Prasarana Bagi Pelaku IKM/UMKM
12. Laporan Keuangan Yang Akuntabel
13. Peningkatan Rekrutmen Guru Agama
14. Peningkatan Akses Dan Responsibilitas Terhadap Keluhan Masyarakat Berbasis IT
15. Peningkatan Destinasi Wisata Serta Prasarananya
16. Peningkatan Sarana Prasarana Kantor Pelayanan Publik
17. Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Dan Swasta

Guna mempercepat implementasi dari program pembangunan daerah tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada hasil dengan menggunakan pendekatan yang bersifat *holistik-tematik*, *integratif* dan *spasial*. Pendekatan *holistik-tematik*, *integratif* dan *spasial* adalah sebagai berikut:

- Pendekatan *holistik-tematik* dalam perencanaan pembangunan daerah, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur / bagian / kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- Pendekatan *integratif* dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
- Pendekatan *spasial* dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Tabel 6.3.
Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif (Sebelum Perubahan)

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Misi 1 : Penguatan birokrasi dan Meningkatkan pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi															
T1 : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	BB		BB		A		A		A		A		
S1 : Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.33	2.33		2.44		2.55		2.66		2.77		2.77		
	Indeks Profesionalitas ASN	55	56		57,5		59		60,5		62		62		
	Nilai SAKIP	B	B		BB		BB		BB		A		A		
	Indeks persepsi anti Korupsi	n/a	3,65		3,69		3,73		3,75		3,8		3,8		
	Indeks Kepuasan Masyarakat	85.28	85.5		86		87		87.5		88.5		88.5		
P1 : Peningkatan akses dan kualitas informasi public	Persentase Peningkatan ekosistem TIK	20%	30%	0	45%	6.400.000.000	60%	5.932.800.000	70%	6.621.296.000	80%	7.622.863.770	80%	7.622.863.770	KOMINFO
	Cakupan akses dan kualitas informasi publik	30%	40%		60%		70%		80%		90%		90%		
P2 : Penyelenggaraan pengamanan informasi pemerintah daerah	Rasio Jumlah Informasi Milik Pemerintah yang diamankan	15%	20%	0	35%	600.000.000	50%	556.200.000	55%	541.059.000	65%	714.643.240	65%	714.643.240	
P3 : Manajemen data/informasi/statistik daerah	Tingkat ketersediaan data/informasi/statistik daerah	5%	10%	0	20%	155.000.000	39%	143.100.000	40%	139.204.500	50%	183.864.470	50%	183.864.470	

Perubahan RPJMD Kota Jambi 2018-2023

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
P4 : Penataan, pelayanan, pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kebutuhan	93,23%	93,23%	3.856.200.000	96%	4.971.000.000	97%	4.608.000.000	98%	4.482.560.000	100%	10.920.670.720	100%	10.920.670.720	BKPSDMD
	Persentase Penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu	85%	85%		89%		91%		93%		95%		95%		
	Persentase ASN yang mendapatkan pembinaan pengendalian	72%	72%		83%		88%		94%		100%		100%		
	Persentase Penilaian Kinerja ASN	85%	85%		87%		87%		87%		87%				
	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi	32%	32%		46%		53%		60%		67%		67%		
	Persentase Pengembangan Kualifikasi ASN				27%		52%		84%		100%		100%		
P5 : Peningkatan dan pengembangan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah	Jumlah OPD yang melaksanakan Penyusunan Dokumen Penganggaran, Pengendalian Keuangan Daerah Tepat Waktu dan sesuai aturan	33 OPD	33 OPD	2.546.041.150	35 OPD	3.622.000.000	37 OPD	3.343.500.000	38 OPD	3.239.732.500	40 OPD	4.262.764.370	40 OPD	4.262.764.370	BPKAD

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Persentase Kemampuan OPD dalam hal Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Belanja	75%	75%		80%		85%		95%		100%		100%		
	Jumlah OPD dan BLUD yang mneyajikan laporan keuangan tepat waktu dan sesuai SAP dan SAK	37 OPD	37 OPD		40 OPD dan 11 BLUD		40 OPD dan 21 BLUD		40 OPD dan 21 BLUD		40 OPD dan 22 BLUD		40 OPD dan 22 BLUD		
	Jumlah OPD yang menyampaikan Laporan Data Barang Milik Daerah yang Akurat dan Tepat waktu	20 PD	20 PD		20 PD		30 PD		40 PD		40 PD		40 PD		
P6: Perencanaan, Penge ndalian dan Evaluasi Pem bangunan	Persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	4.278.543.000	100%	4.906.000.000	100%	4.547.700.000	100%	4.423.901.500	100%	5.843.193.520	100%	5.843.193.520	BAPPEDA
P7: Penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	Persentase Dokumen hasil penelitian yang digunakan sebagai dasar perencanaan	I	100%		100%	200.000.000	100%	270.000.000	100%	297.500.000	100%	436.000.000	100%	436.000.000	
P8 : Peningkatan Sistem pengawasan internal, Pembinaan Internal dan Pengendalian	Cakupan pelaksanaan pembinaan internal dan pengendalian kebijakan KDH	85%	100%	2.343.990.000	100%	2.914.000.000	100%	2.700.900.000	100%	2.627.375.500	100%	8.470.299.490	100%	8.470.299.490	INSPEKTOR AT

Perubahan RPJMD Kota Jambi 2018-2023

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Pelaksanaan Kebijakan KDH															
P9 : Peningkatan kapasitas lembaga dan pelayanan kedinasan DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	1 dok	6 dok	34.956.263.500	6 dok	36.004.000.000	6 dok	33.375.600.000	6 dok	32.467.042.000	6 dok	42.883.233.440	6 dok	42.883.233.440	SETWAN
	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran untuk mengakomodir Program- program kerja DPRD	9 dok	9 dok		9 dok		9dok		9 dok		9 dok		9 dok		
P10: Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, sekretariat daerah, Aparatur dan Keprotokolan	Meningkatnya kinerja layanan keprotokolan	70%	70%	3.400.000.000	80%	4.000.000.000	90%	3.696.300.000	100%	3.582.928.500	100%	4.716.065.940	100%	4.716.065.940	SETDA
	Jumlah telaah/rekomendasi staf ahli walikota terhadap kebijakan pemerintah daerah	1 Telaah/rekomendasi	1 Telaah/rekomendasi		2 Telaah/rekomen dasi		3 Telaah rekomen dasi		3 Telaah rekomen dasi		3 Telaah rekomen dasi		3 Telaah rekomen dasi		
P11 : Peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan setda dan kerumahtanggaan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana rumah jabatan dan kantor Sekretariat Daerah	32,08%	32,08%	1.590.060.000	17,3%	1.279.000.000	17,07%	1.188.900.000	17,07%	1.310.989.000	17,07%	1.846.540.660	17,07%	1.846.540.660	
	Ketepatan waktu Penvampaian LPPD	48%	48%		61%	12.953.000.000	74%		87%	15.131.045.500	100%	22.165.441.030	100%	22.165.441.030	

Perubahan RPJMD Kota Jambi 2018-2023

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
P12: Penataan Administrasi pemerintahan dan kewilayahan	Persentase Ketersediaan Lahan Tanah Untuk Pelayanan Masyarakat	13%	13%		16%		20%	13.806.900.000	23%		32%		32%		
	Nilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	N/A	3 Kec		6 Kec		9 Kec		11 Kec		11 Kec		11 Kec		
P13:Penataan Peraturan Perundang-undangan dan penyelesaian perkara pemerintah daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diselesaikan	20%	20%	1.092.000.000	20%	1.124.000.000	20%	1.041.300.000	20%	1.012.953.500	20%	1.337.932.490	20%	1.337.932.490	
	Presentase penyelesaian perkara Pemerintah Daerah	27,27%	27,27%		27,27%		27,27%		27,27%		27,27%		27,27%		
P14: Peningkatan Kerjasama Daerah	Persentase Fasilitas Kerjasama Luar Negeri	100%	100%	725.000.000	100%	846.000.000	100%	781.200.000	100%	757.384.000	100%	997.100.390	100%	997.100.390	
	Persentase Kesepakatan bersama yang di tindaklanjuti	66,67%	66,67%		76,92%		85,71%		93,33%		100%		100%		
	Persentase Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
P15: Peningkatan koordinasi, fasilitasi dan monitoring bidang perekonomian	Persentase tindak lanjut pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan Monitoring	45%	75%	799.850.000	75%	823.000.000	75%	762.300.000	75%	741.548.500	75%	979.454.380	75%	979.454.380	

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Bidang perekonomian														
P16: Tata Kelola Organisasi dan Ketatalaksanaan	Persentase meningkatnya kualitas anjab dan ABK sesuai dengan peraturan yang berlaku	16%	16%		38%	435.00 0.000	59%	1.053.0 00.000	79%	1.024.25 0.000	100%	1.343.94 9.290	100%	1.343.949. 290	
	Ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja	15%	15%		30%		50%		75%		100%		100%		
	Rata-rata indeks pelayanan publik	B	B		B		A		A		A		A		
P17: Fasilitas dan Koordinasi kegiatan dan kelembagaan Keagamaan	Persentase tindak lanjut pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan keagamaan, kesejahteraan sosial dan kepemudaan	66,67%	66,67%	8.963. 713.75 0	75%	9.232.0 00.000	80%	8.557.2 00.000	100%	8.324.25 4.000	100%	10.994.8 70.330	100%	10.994.870 .330	
P18: Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	71,43%	71,43%	6.200. 000.00 0	72,23%	6.386.0 00.000	73,68%	5.919.3 00.000	75%	5.758.16 3.500	76,19%	7.605.51 7.510	76,19%	7.605.517. 510	
P19: Tata Kelola Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase tertib administrasi pembangunan	50%	70%		75%	2.279.00 0.000	80%	2.112.3 00.000	85%	2.054.79 8.500	100%	2.714.02 5.880	100%	2.714.025. 880	

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Persentase Kinerja Kelembagaan Pengadaan	19,13%	19,13%		37,81%		30,44%		65,00%		69,06%		69,06%		
P20: Penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	93%	93%	2.550.648.000	96%	2.627.000.000	99%	2.434.500.000	100%	2.368.227.500	100%	3.128.011.150	100%	3.128.011.150	DKPS
	cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	82%	82%		86,5%		91 %		95,5%		100%		100%		
	validitas database kependudukan	87%	87%		89%		91%		93%		95%		95%		
	Cakupan Pemanfaatan data Kependudukan	-	26,8%		33,3%		45%		72,7%		100%		100%		
P21: Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan dan non perijinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	86,45%	86,45%	673.760.000	86,75 %	793.000.000	86,85 %	734.400.000	86,95 %	714.408.000	87 %	943.606.460	87 %	943.606.460	DPMP TSP
P22: Pelayanan Umum Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	83%	85%	13.831.600.000	89%	13.831.600.000	92%	13.109.400.000	95%	13.047.058.000	98%	17.689.569.670	98%	17.689.569.670	SEMUA KECAMATAN
P23: Pengelolaan, Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah arsip yang terselamatkan	46.019	1.200	725.920.500	1.200	1.247.000.000	1.200	1.155.600.000	1.200	1.124.142.000	1.200	1.484.793.640	52.019	1.484.793.640	DKP
	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	-	20		36		36		36		36		164		

Perubahan RPJMD Kota Jambi 2018-2023

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Misi 2 : Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat															
T2 : Meningkatkan Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase tingkat pelanggaran terhadap peraturan daerah	9%	9%		6%		5%		3%		3%		3%		
	Penurunan jumlah kasus kebakaran dan kebencanaan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
S2 : Menurunkan tingkat pelanggaran terhadap PERDA dan PERWAL	Penyelesaian jumlah kasus atau pelanggaran PERDA dan PERWAL	82	82		80		75		66		60		60		
P24 : Pembinaan Dan Perlindungan Masyarakat	Rasio Petugas perlindungan masyarakat	45%	54%	798.71 8.800	68%	822.00 0.000	72%	761.40 0.000	80%	740.673. 000	85%	978.297. 890	85%	978.297.89 0	SATPOL PP
P25 : Penyelenggaraan Trantibu m Serta Penegakan Reg ulasi Daerah	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum Dan Ketentraman Mayarakat	60%	75%	5.069. 000.00 0	85%	6.221.0 00.000	90%	5.766.3 00.000	90%	5.609.32 8.500	98%	7.408.93 2.740	98%	7.408.932. 740	
	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kota Jambi	55%	69%				74%				79%				
S3 : meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan	Cakupan pelayanan kebakaran dan kebencanaan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Perubahan RPJMD Kota Jambi 2018-2023

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
P26 : Peningkatan Kesiagaan Di ni dan Manajemen Logistik Kebencanaan	Cakupan pelayanan kesiagaan dini	100%	100%	5.711.580.000	100%	5.882.000.000	100%	5.452.200.000	100%	5.303.779.000	100%	7.005.355.880	100%	7.005.355.880	DISDAMKAR
	Cakupan Peningkatan Pelayanan kebakaran Dan Penyelamatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%
T3: Mewujudkan stabilitas daerah yang kondusif dan aman	Persentase penyelesaian gangguan ideologi, konflik, suku, agama, ras dan antar golongan	76,08%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
S4: Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi pancasila	20%	20%		20%		20%		20%		20%		20%		
S5: Meningkatkan peranan organisasi kemasyarakatan dan parpol dalam pembangunan	Persentase orkemas dan parpol yang berperan aktif di masyarakat	20%	20%		20%		20%		20%		20%		20%		
P27 : Pembinaan, Pemberdayaan dan Fasilitasi bagi Orkemas dan Parpol	Persentase peningkatan pembinaan organisasi kemasyarakatan dalam mewujudkan	-	-	25.425.000	100%	500.000.000	100%	463.500.000	100%	450.882.500	100%	595.536.760	100%	595.536.760	BKBP

Perubahan RPJMD Kota Jambi 2018-2023

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	kondisi daerah yang kondusif														
P28 : Peningkatan Karakter, Ideologi dan Wawasan Kebangsaan serta Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase peningkatan peran forum kemasyarakatan dalam mengantisipasi sumber potensi konflik di daerah	-	-	494.88 9.000	100%	700.00 0.000	100%	648.90 0.000	100%	631.235. 500	100%	833.751. 900	100%	833.751.90 0	
Misi 3 : Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan															
T4 : Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	N/A	5.1		5.67		6.0		6.40		7.00		7.00		
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	49,57	52,06		52.39		52,57		52,74		52,86		52,86		
S6 : meningkatkan layanan infrastruktur dan utilitas perkotaan	Cakupan Layanan Infrastruktur Dan Utilitas	50.59%	53,07%		60,77%		70,61%		78,25%		85,79%		85,79%		
P29: Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan	Capaian ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan	65%	65%	3.825.5 30.000	74%	6.940.0 00.000	84%	6.433.2 00.000	91%	6.258.07 4.000	100%	8.265.81 1.170	100%	8.265.811. 170	DISHUB
	Cakupan yang terlayani angkutan umum	33.89%	41.39%		54.75%		70.19%		85.09%		100%		100%		
P30: Pengendalian dan Peningkatan Disiplin Berjalan Lintas	Pengurangan Jumlah Titik Kemacetan	60 Titik	41 Tititik	4.423.0 20.000	36 Titik	1.555.0 00.000	28 Titik	1.440.9 00.000	20 Titik	1.401.67 5.500	0 Titik	1.797.44 2.700	0 Titik	1.797.442. 700	

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
P31 : Peningkatan Pelayanan Perparkiran	Persentase Pelayanan Perparkiran	68.17%	74.76%	2.239.964.000	80.74%	2.307.000.000	88.99%	2.138.400.000	94.58%	2.080.188.000	100%	27.475.510.100	100%	27.475.510.100	DPRKP
P32 : Penataan dan Peningkatan kualitas Lingkungan Permukiman Perkotaan	Persentase penanganan Luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan	78.79%	78.79%	3.804.751.000	83%	3.918.000.000	87%	3.631.500.000	87%	3.532.642.500	87%	4.665.996.790	87%	4.665.996.790	
P33 : Pengembangan dan Fasilitas Penyelenggaraan Perumahan	Persentase Pemenuhan Rumah bagi MBR	12.5%	12.5%	2.500.000.000	25%	2.500.000.000	50%	6.817.500.000	75%	6.631.912.500	100%	8.759.585.530	100%	8.759.585.530	
P34 : Peningkatan, Pemeliharaan dan Penataan Utilitas Umum	Persentase Permukiman yang dilayani Utilitas Umum	20%	20%	24.758.245.000	40%	23.000.000.000	60%	21.321.000.000	80%	20.740.595.000	100%	27.394.665.890	100%	27.394.665.890	DPUPR
P35 : Pembangunan, pemeliharaan dan perluasan utilitas perkotaan	Rasio Cakupan Pelayanan Air Minum	66,39%	67,39%	88.627.428.650	69,39%	525.884.157.000	71,39%	107.855.147.059	73,39%	113.707.253.336	75,39%	132.122.55.147	75,39%	132.122.55.147	
	Rasio Cakupan Pelayanan Air Limbah	0.39%	0,97%		1.56%		2,16%		2,77%		3,38%		3,38%		
	Rasio Bangunan dalam kondisi baik	37.20%	53,37%		61,46%		69,54%		77,63%		85,18%		85,18%		
P36 : Pembangunan , peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Ratio jalan status kota dalam Kondisi Baik	86.32%	89.06%	112.288.616.400	91.79%	112.373.273.000	94.53%	106.112.742.498	97.26%	105.228.469.644	100%	141.687.039.420	100%	141.687.039.420	
	Ratio jembatan dalam Kondisi Baik	94.59%	94.59%		97.3%		97.3%		100%		100%		100%		
P37 : Peningkatan dan pemeliharaan sistem jaringan drainase/sungai	Rasio Sistem Jaringan Drainase/sungai dalam Kondisi Baik	n/a	5,26	10.990.300.000	15,79%	30.125.382.000	47,37%	33.204.284.379	57,89%	30.855.000.000	68,42%	44.799.000.000	68,42%	44.799.000.000	DPUPR

Perubahan RPJMD Kota Jambi 2018-2023

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
P38: Perencanaan Teknis ke PU-an	Rasio dokumen perencanaan yang diimplementasikan	76%	80%	837.120.600	84%	7.182.478.000	90%	6.550.740.000	94%	6.496.150.500	100%	8.746.875.585	100%	8.746.875.585	
P39: Fasilitas, koordinasi pembinaan dan keterpaduan tata ruang	Rasio Kesesuaian Ruang	94.46%	95%	904.097.000	95.2%	1.640.062.000	95.5%	1.612.854.000	95.7%	1.726.913.550	95.9%	2.325.238.304	95.9%	2.325.238.304	
S7 : Meningkatkan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks kualitas air	32,11	37,75		38,30		38,50		38,65		38,75		38,75		
	Indeks kualitas udara	80,68	80,70		80,72		80,74		80,76		80,78		80,78		
	Indeks tutupan lahan	39,33	41,30		41,70		42,00		42,30		42,50		42,50		
P40: Peningkatan kinerja pengelolaan sampah	Persentase Jumlah Sampah yang ditangani	79,16%	78,66%	29.483.208.050	78,16%	41.417.000.000	76,66%	38.392.063.564	77,16%	37.349.689.201	76,66%	49.336.289.445	76,66%	49.336.289.445	DLH
	Persentase jumlah pengurangan sampah ditingkat sumber	11,73%	12,23%		12,73%		13,23%		13,73%		14,23%		14,23%		
P41 : Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Kegiatan Usaha yang Sudah Mengelola Lingkungan sesuai dengan Dokumen Lingkungan	136	145	2.015.919.666	153	2.076.000.000	160	2.138.000.000	170	2.202.140.000,00	180	2.268.204.000	180	2.268.204.000	DLH
P42 : Perlindungan dan Rehabilitasi Sumber daya alam	Persentase Kecukupan Ruang Terbuka Hijau Publik	11,79%	12%	10.658.995.600	14%	10.978.000.000	16%	10.176.300.000	18%	9.899.278.500	20%	13.075.199.640	20%	13.075.199.640	
Misi 4 : Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan															
T5 : Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5.26	5.28		5.39		5.50		5,61		5.72		5.72		

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,56	6,56		6,42		6,28		6,14		6.00		6.00		
S11 : Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	20	36		52		68		84		100		100		
P43 : Pembinaan, Peningkatan, dan Pengawasan Perdagangan	Cakupan Bina Perdagangan	88%	90%	4.389.85 8.500	92,25%	5.950.000. 000	95,25%	5.463.9 00.000	97,50%	5.257.25 0.000	100%	7.014.15 0.000	100%	7.014.150. 000	DPP
S12 : Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	90,2	90,5		91		91,5		92		92,5		92,5		
P44 : Peningkatan, Produksi, Mutu Produk dan Diversifikasi Sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan (gram/ kapita/ hari)	2.944	2.944	4.507.24 2.000	2,989	3.539.000. 000	3.080	3.757.5 00.000	3.180	3.659.25 0.000	3.200	5.126.41 6.060	3.200	5.126.416. 060	
		76,24	76,24		79		82		85		88		88		
P45: Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Pemberdayaan Kelembagaan Tani	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	88,5	88,5	1.143.31 9.000	89	2.375.200. 000	89,5	2.927.9 43.000	90	2.765.27 9.500	90,5	3.819.36 0.000	90,5	3.819.360. 000	DPKP
	Penurunan Pangan segar yang Tercemar	7	7		6		5		4		3		3		
S13 : Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	2,36%	2,37%		2,38%		2,39%		2,40%		2,41%		2,41%		

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
P46 : Pembinaan, peningkatan dan perluasan pengelolaan pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	400.000	450.000	2.474.305.000	500.000	2.000.000.000	600.000	1.854.000.000	650.000	2.653.530.000	700.000	5.163.074.163	700.000	5.163.074.163	DPP
	PAD sektor pariwisata	43 M	43,5 M		47 M		48 M		50 M		50 M				
	Lama Kunjungan wisata	3 hari	3 hari		3 hari		3 hari		3 hari		3 hari				
P47 : Pembinaan, Peningkatan dan Perluasan Pengelolaan Kebudayaan	Jumlah pelestarian, penyelenggaraan even seni dan budaya	5	5		5	1.500.000.000	6	1.390.500.000	6	1.352.647.500	6	1.786.608.100	6	1.786.608.100	
S14 : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4%	8%		9%		9%		9%		9%		9%		
P48 : Peningkatan dan pengelolaan pendapatan daerah	Persentase pertumbuhan wajib pajak daerah	9%	9%	3.053.202.000	9%	3.644.000.000	9%	3.377.700.000	9%	3.285.751.500	9%	4.339.898.220	9%	4.339.898.220	BPPRD
	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Keakuratan Basis Data dan Pelaporan Pajak	60%	60%		63%		65%		68%		70%		70%		
	Persentase Penyelesaian Piutang Pajak	10%	10%		15%		20%		25%		30%		30%		
S15 : Meningkatkan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	410 M	430.5 M		430.5 M		474.62 M		498.35 M		523.37 M		523.37 M		

Misi/Tujuan/Sasaran/Pro gram Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
P50 : Peningkatan realisasi investasi	Realisasi Investasi	410 M	430.5 M	269.95 5.500	430.5 M	678.00 0.000	474.62 M	628.20 0.000	498.35 M	611.099. 000	523.37 M	807.153. 720	523.37 M	807.153.72 0	DPMPTSP
S16 : Meningkatkan Penyerapan dan perlindungan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	64,96%	65%		65,25%		65,50%		65,75%		66%		66%		
P51 : Peningkatan kualitas, perlindungan dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja terdaftar yang dilatih dan ditempatkan	6%	7%		7%		7%		7%		7%		7%		DTKK
	Persentase Peningkatan penyerapan perlindungan tenaga kerja dan hubungan industrial yang harmonis	56%	56%	796.731. 500	57%	1.820.000. 000		1.686.6 27.810	59%	1.640.71 4.053		2.167.09 3.310	60%	2.167.093. 310	
S17 : Meningkatkan Daya Saing Usaha Skala mikro dan Kecil	Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	7,61%	8,08%		8,54%		9,01%		9,47%		9,94%		10,00%		
	Persentase Daya Saing Produk IKM	4,3	4,3		5,35		6,5		7,5		8,3		8,3		
	Persentase koperasi berkualitas	13%	16,06%		19,27%		23,85%		29,82%		36,70%		37,00%		
P52 : Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	48,31%	49%	859.445. 250	49,69%	885.000.00 0	50,38%	819.90 0.000	51,07%	797.580. 500	51,76%	1.053.46 3.200	51,76%	1.053.463. 200	DTKK
P53: Pembinaan dan peningkatan Industri Kecil Menengah	Cakupan Bina IKM	4,3	4,3	4.108.76 3.500	5,35	2.450.000. 000	6,5	2.313.0 00.000	7,5	2.320.50 0.000	8,3	3.210.05 0.000	8,3	3.210.050. 000	DPP

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
P54 : Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif yang melaksanakan RAT	41,28%	48,16%	609.120.250	57,33%	627.000.000	68,8%	580.500.000	82,56%	564.697.500	98,62%	745.865.200	98,62%	745.865.200	DTKK
Misi 5 : peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan															
T6 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	76.74	77.14		77.54		77.94		78.44		78.84		78.84		
	Indeks Pembangunan Gender	94.90	94.90		94.91		94.93		94.94		94.95		94.95		
	Kriteria Kota Layak Anak	Pratama	Madya		Nindya		Utama		KLA		KLA		KLA		
	Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	60,23%	60,23%		61,43%		63%		64%		66%		66%		
	Persentase Penduduk Miskin	8,49	7,89		7,29		6,69		6,09		5,49		5,49		
S18 : Meningkatkan Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,34%	72,35%		72,35%		72,36%		72,36%		72,37%		72,37%		
P55: Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Meningkatkan status puskesmas yang terakreditasi	5 Puskemas utama dan 0 Puskemas Paripurna	3 Puskemas Utama	76.629.583.850	8 Puskemas Utama	80.928.000.000	6 Puskemas Utama	77.719.500.000	3 Puskemas Paripurna	75.603.802.500	2 Puskemas Paripurna	105.703.325.992	2 Puskemas Paripurna	105.703.325.992	DINKES Dan RSUD

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit yang telah memenuhi kelengkapan Sarana, Prasarana dan alat kesehatan sesuai standar minimal 85%.	0	20%		30%		40%		50%		60%		60%		
	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan kesehatan rujukan	B	B		B		A		A		A		A		
	Cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil	93,37%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Cakupan Pelayanan Kesehatan ibu bersalin dan bayi baru lahir	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase pelayanan penyakit menular dan tidak menular	76,50%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Rumah Sakit pemerintah yang ter akreditasi	50%	50%		50%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Puskesmas yang menjalankan pelayanan kesehatan tradisional	80%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Misi/Tujuan/Sasaran/Pro gram Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan kesehatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Pelayanan Imunisasi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase pelayanan gizi masyarakat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	75%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Cakupan pelayanan kesehatan remaja	40%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Cakupan pelayanan kesehatan lansia	75%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase pencapaian Keluarga berPHBS	70%	75%		80%		85%		90%		95%		95%		
	Cakupan Kelurahan yang Melaksanakan STBM	40%	60%		70%		75%		80%		85%		85%		
	Persentase pelayanan Kesehatan olah raga dan kesehatan kerja di puskesmas	50%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Persentase Ketenagaan kesehatan sesuai dengan kompetensi	96%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan pelayanan kefarmasian	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
S19: Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14.25	14,60		14.61		14.62		14.63		14.64		14.64		
	Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan Pendidikan	21,32	21,32		17,32		12,32		8,32		4,32		4,32		
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,68	10,68		10,69		10,70		10,71		10,72		10,72		
P56 : Peningkatan akses, mutu dan tata kelola pendidikan	Angka partisipasi kasar (APK) PAUD dan PNF	'- APK PAUD usia 5-6 tahun 75 %, usia 3-5 50 %, usia 0-3 20%	'APK PAUD usia 5-6 tahun 90 %, usia 3-5 55 %, usia 0-3 30%	121.598.505.200	'APK PAUD usia 5-6 tahun 100 %, usia 3-5 60%, usia 0-3 35%	132.492.000.000	'APK PAUD usia 5-6 tahun 100 %, usia 3-5 65%, usia 0-3 40%	124.572.600.000	'APK PAUD usia 5-6 tahun 100 %, usia 3-5 70%, usia 0-3 45%	121.068.849.000	'APK PAUD usia 5-6 tahun 100 %, usia 3-5 75%, usia 0-3 50%	166.766.181.020	'APK PAUD usia 5-6 tahun 100 %, usia 3-5 75%, usia 0-3 50%	166.766.181.020	
	'Jumlah anak putus sekolah atau yang tidak melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi	'Paket A : 128 Orang, Paket B : 370	'Paket A : 68 Orang, Paket B : 418		'Paket A : 60 Orang, Paket B : 310		'Paket A : 40 Orang, Paket B : 300 Orang ,		'Paket A : 35 Orang, Paket B : 250		'Paket A : 30 Orang, Paket B : 225		'Paket A : 30 Orang, Paket B : 225		

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	memperoleh layanan pendidikan	Orang , Paket C : 418 Orang	Orang , Paket C : 617 Orang		Orang , Paket C : 408 Orang		Paket C : 450 Orang		Orang , Paket C : 425 Orang		Orang , Paket C : 400 Orang		Orang , Paket C : 400 Orang		
	'Jumlah anak putus sekolah atau yang tidak melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi memperoleh pendidikan kecakapan hidup	'250 Orang	'140 Orang		'160 Orang		'180 Orang		'200 Orang		'220 Orang		'220 Orang		
	Angka partisipasi kasar (APK) SD	114,3%	114,4%		114,5%		114,6%		114,7%		114,8%		114,8%		
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	97,6%	97,8%		97,9%		98%		98,1%		98,2%		98,2%		
	Angka Partisipasi SD	100,48%	100,62%		100,70%		100,80%		100,85%		100,88%		100,88%		
	Rerata UAS SD	60,25%	60,50%		60,65%		60,73%		60,79%		60,82%		60,82%		
	Angka partisipasi kasar (APK) SMP	98,8%	99,0%		99,3%		99,5%		99,6%		'99,8%		'99,8%		
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	71,7%	72,0%		72,3%		72,5%		72,6%		72,8%		72,8%		
	Angka Partisipasi SMP	83%	83,5%		83,8%		84%		84,2%		84,4%		84,4%		
	Rerata UN SMP	50,93%	51,20%		51,40%		51,50%		51,60%		51,65%		51,65%		
	Kompetensi pendidik fan tenaga kependidikan yang memenuhi standar nasional	92,60%	92,80%		93%		93,20%		93,40%		93,50%		93,50%		

Perubahan RPJMD Kota Jambi 2018-2023

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
P57 : Peningkatan Mutu dan Pelayanan Perpustakaan	Jumlah Rata - Rata pengunjung Perpustakaan Pertahun	32.092 Pengunjung	35.173 Pengunjung	552.691.000	37.836 Pengunjung	1.069.000.000	42.836 Pengunjung	990.900.000	47.836 Pengunjung	963.925.500	52.836 Pengunjung	1.273.175.590	52.836 Pengunjung	1.273.175.590	DKP
S20 : Mengendalikan angka Kelahiran Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	N/A	1,05		1,05		1,03		1,01		1,01		1,01		
	Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera	N/A	96,23%		96,46%		96,69%		96,92%		97,15%		97,15%		
P58 : Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Laju Pertumbuhan Penduduk	N/A	1,05	4.759.993.000	1,05	4.902.000.000	1,03	4.544.100.000	1,01	4.420.039.950	1,01	5.838.567.560	1,01	5.838.567.560	DPPKB
	Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera	N/A	96,23%		96,46%		96,69%		96,92%		97,15%		97,15%		
S21 : Meningkatkan Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender	94.89	94.90		94.91		94.93		94.94		94.95		94.95		
	Indeks Pemberdayaan Gender	68.07	68.10		68.20		68.30		68.40		68.50		68.50		
S22 : Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	Persentase Hak Anak yang Terpenuhi	50%	70%		80%		90%		100%		100%		100%		
P59 : Peningkatan Kesetaraan Gender, perlindungan perempuan dan anak	Penurunan Ratio KDRT	0,025%	0,023%	3.591.385.000	0,021%	3.699.000.000	0,020%	3.428.100.000	0,019%	3.334.779.500	0,017%	4.404.655.120	0,017%	4.404.655.120	DPMPPA

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Rasio Penurunan Kekerasan Terhadap Anak	0,0247	0,02371		0,0227		0,0217		0,0207		0,0197		0,0197		
	Persentase Organisasi Perempuan Yang Aktif	75%	80%		82%		85%		87%		90%		90%		
S23 : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	60.23%	60.23%		61.43%		63%		64%		66%		66%		
P60 : Peningkatan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan masyarakat	Persentase Kelompok UEM yang Aktif	73%	75%	4.351.493.000	77%	4.482.000.000	79%	4.154.400.000	81%	4.154.400.000	83%	5.337.854.260	83%	5.337.854.260	DPMPPA
	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif	63%	65%		66%		67%		68%		70%		70%		
	Persentase Pemanfaatan Alat Teknologi Tepat Guna	70%	75%		77%		80%		83%		85%		85%		
	Persentase Usulan Sarana Prasarana Kelurahan yang Terakomodir	92%	93%		94%		95%		96%		97%		97%		
P61 : Peningkatan Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat kecamatan	Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kecamatan	40%	70%		75%	15.296.400.000	80%	13.886.730.000	85%	13.214.177.350	90%	16.996.886.802	90%	16.996.886.802	SEMUA KECAMATAN

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
P62: Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Persentase usulan masyarakat dikelurahan yang diakomodir	50%	50%		50%	27.812.000.000	60%	25.781.724.000	70%	25.079.888.180	80%	33.126.106.423	80%	33.126.106.423	
P63: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina ditingkat kelurahan	40%	45%		50%	7.998.000.000	60%	7.414.146.000	70%	7.213.166.470	80%	9.526.197.295	80%	9.526.197.295	
S24 : Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	N/A	50		50,5		51		51,5		52		52		
P64 : Program Pembinaan dan peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan kepemudaan	Persentase pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam organisasi	30%	40%	7.752.810.000	50%	8.528.091.000	60%	8.442.810.090	70%	8.771.141.594	80%	12.372.469.142	80%	12.372.469.142	DISPORA
	Persentase pembinaan cabang olahraga prestasi	68,89%	71,11%		73,33%		75,56%	77,78%	80%		80%				
S25 : Menurunkan angka PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	65%	65%		70%		75%		80%		85%		85%		
P65 : Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan PMKS	Persentase pelayanan bidang perlindungan dan jaminan sosial dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar	60%	100%	2.739.152.000	100%	5.321.000.000	100%	4.932.000.000	100%	4.797.740.000	100%	11.336.967.880	100%	11.336.967.880	DINSOS
	Persentase pelayanan dan rehabilitasi penyandang masalah	60%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Misi/Tujuan/Sasaran/Pro gram Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	kesejahteraan sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya														
	Persentase pemberdayaan sosial potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam menangani PMKS	60%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase peningkatan penangan jumlah keluarga miskin	60%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Tabel 6.4.
Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif (Setelah Perubahan)

NOMOR							Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
MISI 1 : PENGUATAN BIROKRASI DAN MENINGKATKAN PELAYANAN MASYARAKAT BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI																			
1	1						Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	B		B		BB		BB		BB		DISKOMINFO, BKPSDMD, BAPPEDA, ORGANISASI, INPEKTORAT DAN OPD
1	1	1	1				Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.44		2.55		2.9		3		3.1		DISKOMINFO, DKP
1	1	1	1	1	1	1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase peningkatan pemanfaatan aplikasi informatika					75%	3,193,192,965	80%	2,579,443,100	90%	3,077,683,910	DISKOMINFO
1	1	1	1	1	1	2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas informasi					70%	5,392,878,753	80%	4,011,400,000	85%	4,347,389,603	
1	1	1	1	1	1	3	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Terwujudnya pengamanan informasi					50%	556,200,000	55%	541,059,000	65%	56,175,254	
1	1	1	1	1	1	4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tersedianya data statistik sektoral					39%	143,100,000	40%	139,204,500	50%	58,942,700	
								Indeks Profesionalitas ASN	56		57.5		63.08		64.08		64.88		BKPSDMD
1	1	1	1	2	1		Program Kepegawaian Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu					91%		93%		95%	2,731,712,866	BKPSDMD
								Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kebutuhan					97%	2,575,878,850	98%	4,062,800,000	99%		
								Persentase Kinerja ASN yang mendapatkan Nilai Baik					87%		89%		91%		
								Persentase penurunan angka pelanggaran Disiplin ASN					6,25%		6,7%		7,1%		

Perubahan RPJMD Kota Jambi 2018-2023

NOMOR							Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			Tahun 2023	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
1	1	1	1	2	2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan Formal Persentase Pengembangan Kompetensi					25% 50%	2,870,714,239	30% 53%	5,521,977,000	35% 57%	2,385,978,050	BKPSDMD	
							Nilai SAKIP	B		BB		BB		BB		BB		BAPPEDA, ORGANISASI, INPEKTORAT	
1	1	1	1	3	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					B	214,233,938,092	B	214,233,938,092	B	199,361,298,759	DISDIK	
1	1	1	1	3	2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					100%	187,483,323,247	100%	358,068,212,950	100%	199,359,801,490	DINKES	
1	1	1	1	3	3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					BB	13,459,305,819	BB	13,459,305,819	BB	14,318,574,262	DPUPR	
1	1	1	1	3	4	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					B	6,484,749,491	B	6,484,749,491	B	6,115,296,992	DPRKP	
1	1	1	1	3	5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					NA	11,285,934,787	NA	8,726,504,018	NA	7,830,187,796	SATPOL PP	
1	1	1	1	3	6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					B	7,937,638,363	B	7,937,638,363	B	7,176,225,594	DISDAMKAR	
1	1	1	1	3	7	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					7101%	6,649,685,913	7439%	6,335,145,700	7777%	6,493,664,235	DINSOS	
1	1	1	1	3	8	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					BB	4,999,363,551	BB	4,999,363,551	BB	5,725,601,328	DTKK	
1	1	1	1	3	9	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					A	10,917,378,621	A	10,917,378,621	A	11,103,956,166	DLH	
1	1	1	1	3	10	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					NA	8,031,878,382	NA	6,860,654,988	NA	6,965,077,890	DKPS	

NOMOR						Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			Tahun 2023	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
1	1	1	1	3	11	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					BB	5,011,924,360	BB	5,030,247,224	BB	5,325,548,451	DPMPPA
1	1	1	1	3	12	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					100%	5,124,485,135	100%	5,205,924,628	100%	5,530,237,000	DPPKB
1	1	1	1	3	13	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					BB	13,031,123,530	BB	13,031,123,530	BB	11,879,494,992	DISHUB
1	1	1	1	3	14	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					CC	5,117,847,047	CC	5,117,847,047	CC	5,785,808,533	DISKOMINFO
1	1	1	1	3	15	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					BB	5,973,083,055	BB	5,973,083,055	BB	6,495,096,267	DPMP TSP
1	1	1	1	3	16	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					B	4,612,244,452	B	5,119,155,666	B	5,229,327,667	DISPORA
1	1	1	1	3	17	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					100%	6,863,754,491	100%	6,863,754,491	100%	6,984,236,131	DKP
1	1	1	1	3	18	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					BB	4,655,405,166	BB	4,655,405,166	BB	5,549,114,815	DPK
1	1	1	1	3	19	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					BB	13,874,550,200	BB	13,874,550,200	BB	14,395,329,532	DPKP
1	1	1	1	3	20	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					BB	8,992,466,420	BB	8,992,466,420	BB	8,567,763,686	DPP
1	1	1	1	3	21	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					NA	34,853,866,119	NA	34,655,118,747	NA	35,273,352,102	SETDA
1	1	1	1	3	22	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					NA	46,697,545,614	NA	44,307,423,490	NA	40,572,856,381	SET. DPRD
1	1	1	1	3	23	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					73.0 - 73.5	7,209,200,114	73.6-73.9	12,114,800,000	74.0-74.5	8,514,304,363	BAPPEDA

NOMOR						Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			Tahun 2023	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
1	1	1	1	3	24	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					BB	9,103,542,958	BB	9,103,542,958	BB	10,804,180,326	BPKAD
1	1	1	1	3	25	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					BB	23,312,878,535	BB	23,312,878,535	BB	22,271,554,606	BPPRD
1	1	1	1	3	26	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					B	22,748,522,251	BB	23,506,222,800	A	8,770,309,084	BKPSDMD
1	1	1	1	3	27	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					B	8,768,703,424	B	9,084,893,712	B	11,139,849,900	INSPEKTORAT
1	1	1	1	3	28	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					7205%	6,641,324,425	7431%	7,305,456,860	7657%	6,506,423,562	Kecamatan Kota Baru
1	1	1	1	3	29	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					7339%	7,009,192,056	7546%	9,060,570,864	7753%	6,636,198,343	Kecamatan Telanaipura
1	1	1	1	3	30	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					7956%	7,779,999,351	8406%	8,557,999,286	8856%	8,148,166,199	Kecamatan Jelutung
1	1	1	1	3	31	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					7589%	4,908,969,880	7830%	4,990,074,471	8071%	5,455,475,458	Kecamatan Pasar
1	1	1	1	3	32	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					7800%	8,029,960,245	7960%	8,832,956,270	8120%	7,002,478,792	Kecamatan Jambi Selatan
1	1	1	1	3	33	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					7927%	11,693,328,500	8080%	13,763,866,008	8156%	9,392,366,255	Kecamatan Jambi Timur
1	1	1	1	3	34	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					7143%	5,544,816,740	7409%	6,000,291,544	7662%	5,870,135,142	Kecamatan Danau Teluk
1	1	1	1	3	35	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					7357%	6,536,060,709	7755%	6,536,060,709	8153%	6,989,507,394	Kecamatan Pelayangan
1	1	1	1	3	36	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					7613%	8,029,960,245	7763%	8,832,956,269	7913%	8,557,564,552	Kecamatan Alam Barajo

NOMOR							Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			Tahun 2023	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
1	1	1	1	3	37	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					7241%	6,242,259,633	7355%	6,866,485,596	7461%	6,026,974,929	Kecamatan Danau Sipin	
1	1	1	1	3	38	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					7812%	6,573,292,270	8140%	6,919,255,021	8468%	6,775,776,901	Kecamatan Paal Merah	
1	1	1	1	3	39	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					NA	4,430,425,795	NA	4,430,425,795	NA	4,095,269,185	BKBP	
1	1	1	1	3	40	Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Program Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti					100%	26,538,938,800	100%	26,629,548,976	100%	23,521,978,554	SETDA	
1	1	1	1	3	41	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian dan SDA yang Diimplementasikan					100%	3,363,999,721	100%	3,385,669,477	100%	1,779,669,344	SETDA	
1	1	1	1	3	42	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah					100%	1,444,393,000	100%	1,099,412,146	100%	1,382,963,985	BAPPEDA	
1	1	1	1	3	43	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah					21,33	1,210,297,551	21,57	1,523,998,120	21,81	1,184,565,031		
1	1	1	1	3	44	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan					100%	745,553,419	100%	917,000,000	100%	692,166,621		
1	1	1	1	3	45	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah					70%	1,216,420,678	75%	1,365,111,673	80%	1,972,143,771	BPKAD	
1	1	1	1	3	46	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah					100%	29,467,424,142	100%	27,890,213,645	100%	27,895,918,978		
1	1	1	1	3	47	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Cakupan Pelaksanaan Pengawasan, Pembinaan dan Evaluasi SAKIP PD					100%	2,414,850,000	100%	1,288,720,000	100%	1,290,350,100	INSPEKORAT	
							Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)					2.352		2.648		2.972		INSPEKTORAT	
1	1	1	1	4	1	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Cakupan Pelaksanaan, Pembinaan dan Evaluasi RB PD					100%	397,685,000	100%	1,618,825,000	100%	832,800,000	INSPEKORAT	

NOMOR							Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			Tahun 2023	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
								Indeks Pelayanan Publik (IPP)										ORGANISASI DAN OPD PELAYANAN PUBLIK	
1	1	1	1	5	1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD					100%	27,011,923,250	100%	27,361,376,510	100%	26,620,143,619	Sekretariat DPRD	
1	1	1	1	5	2	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan					99%	187,800,697	100%	273,423,700	100%	385,057,260	DKPS	
1	1	1	1	5	3	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil					99.00%	187,800,697	100%	273,423,700	100%	339,600,500	DKPS	
1	1	1	1	5	4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Validitas database Kependudukan					91%		93%		95%		DKPS	
							Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan					53.26%	2,820,191,495	80.4%	2,282,639,011	53.26%	1,701,364,321	DKPS	
1	1	1	1	5	5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Meningkatnya kualitas profil kependudukan Kota Jambi					100%	32,574,960	100%	32,574,960	100%	35,900,029	DKPS	
1	1	1	1	5	6	Program Pengelolaan Arsip	Jumlah Pengguna Pelayanan Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati diri Bangsa					0%		350 Orang		357 Orang		DKP	
							Jumlah Arsip Terjaga dan Arsip Statis Sebagai Warisan Budaya yang dipreservasi						0		877,927,645		350,407,433		
							Jumlah Arsip Yang Telah Habis Masa Retensinya					52%	10,630,643	68%	283,332,637	88%	162,873,291	DKP	
1	1	1	1	5	8	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Jumlah Perizinan Penggunaan Arsip					0%	0	1 Izin	12,895,300	1 Izin	38,290,218	DKP	
1	1	1	1	5	9	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan					87.93	151,105,515	90.65	166,216,600	93.37	904,138,865	Kecamatan Kota Baru	
1	1	1	1	5	10	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan					92	84.164.541	95	96,789,222	98	1,888,787,536	Kecamatan Telanaipura	
1	1	1	1	5	11	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan					84%	107,740,360	88%	118,514,396	92%	231,357,426	Kecamatan Jelutung	
1	1	1	1	5	12	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan					92	95,061,300	93	320,913,500	95	286,855,720	Kecamatan Pasar	

NOMOR						Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			Tahun 2023	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
1	1	1	1	5	13	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan					80%	742,551,159	80%	816,806,275	80%	2,094,151,227	Kecamatan Jambi Selatan
1	1	1	1	5	14	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan					92	687,800,000	95	756,580,000	98	630,231,160	Kecamatan Jambi Timur
1	1	1	1	5	15	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan					87	19,797,942	88	30,100,050	89	227,028,854	Kecamatan Danau Teluk
1	1	1	1	5	16	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan					3.67	25,897,987	3.89	150,258,800	4.11	156,218,020	Kecamatan Pelayangan
1	1	1	1	5	17	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan					90	742,551,159	95	816,806,275	98	540,061,482	Kecamatan Alam Barajo
1	1	1	1	5	18	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan					88%	304,425,910	90%	334,868,501	92%	440,681,919	Kecamatan Danau Sipin
1	1	1	1	5	19	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan					93	239,008,840	94	262,909,724	95	129,111,970	Kecamatan Paal Merah
MISI 2 : PENGUATAN PENEGAKAN HUKUM, TRANTIBMAS DAN KENYAMANAN MASYARAKAT																		
2	1					Meningkatnya Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Peningkatan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	-		-		75%		79%		81%		SATPOL PP
2	1	1	1			Optimalisasi Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase PERDA dan PERWAL yang Ditegakkan					81%		84%		86%		SATPOL PP
2	1	1	1	1	1	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat					NA	1,168,675,821	76%	6,320,695,982	79%	6,465,812,204	SATPOL PP
							Penanganan jumlah kasus kebakaran dan kebencanaan	100%		100%		100%		100%		100%		DISDAMKAR

NOMOR							Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			Tahun 2023	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
2	1	2	1				Meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan	Cakupan pelayanan pemadam kebakaran	100%		100%		100%		100%		DISDAMKAR		
2	1	2	1	1	1		Program Penanggulangan Bencana	Penurunan angka kejadian bencana			26%	3,976,716,676	25%	3,882,060,000	23%	0	DISDAMKAR		
2	1	2	1	1	2		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Penurunan Angka Kejadian Kebakaran			85%	9,279,005,576	85%	9,058,140,000	83%	5,441,774,406	DISDAMKAR		
2	2						Mewujudkan Stabilitas Daerah yang Kondusif dan aman	Persentase Penyelesaian Gangguan Ideologi, konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan	100%		100%		100%		100%		BKBP		
2	2	1	1				Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi Pancasila	20%		40%		60%		80%		100%	BKBP	
2	2	1	1	1	1		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase peningkatan penguatan pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang cinta tanah air			100%	315,403,000	100%	315,403,000	100%	263,859,000	BKBP		
2	2	1	1	1	2		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Peningkatan Peran Patai Politik dan Partisipasi masyarakat dalam Pemilu			100%	1,487,851,244	100%	1,487,851,244	100%	3,477,837,895	BKBP		
2	2	1	1	1	3		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase peningkatan pembinaan organisasi kemasyarakatan dalam mewujudkan kondisi daerah yang kondusif			100%	716,799,961	100%	716,799,961	100%	621,580,000	BKBP		
2	2	1	2				Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dan Parpol dalam pembangunan	Persentase orkemas dan Parpol yang berperan aktif di masyarakat	20%		40%		60%		80%		100%	BKBP	

Perubahan RPJMD Kota Jambi 2018-2023

NOMOR							Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	2	1	2	1	1		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase peningkatan fasilitas pembinaan umat beragama dan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba Persentase peningkatan kewaspadaan daerah dan potensi konflik di Kota Jambi					100%	248,069,000	100%	248,069,000	100%	186,760,000	BKBP
2	2	1	2	1	2		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial						100%	134,651,000	100%	134,651,000	100%	807,693,920	BKBP
MISI 3 : PENGUATAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR DAN UTILITAS PERKOTAAN SERTA PENATAAN LINGKUNGAN																			
3	1						Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	5.1		5.67		7.47		7.5		7.7		DPUPR, DPRKP, DISHUB
3	1	1	1				Peningkatan Kualitas Pelayanan Perhubungan	Penurunan V/C Ratio Jaringan Jalan					0.48		0.47		0.46		DISHUB
3	1	1	1	1	1		Program Pengelolaan Pelayanan	Rasio Layanan Angkutan Sungai dan Danau					45%	700,000,000	64%	700,000,000	71%	156,525,585	DISHUB
3	1	1	1	1	2		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penurunan V/C Ratio Jaringan Jalan					0.48	40,879,225,000	0.47	31,320,445,000	0.46	8,196,979,423	
3	1	1	2				Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni	Persentase Perumahan dan Permukiman Tidak Layak Huni yang ditangani					48.06%		49.11%		54.71%		DPRKP
3	1	1	2	1	1		Program Pengembangan Perumahan	Penyediaan Rumah Layak Huni bagi MBR					60%	806,021,206	63%	1,092,872,897	65%	602,943,199	DPRKP
3	1	1	2	1	2		Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh					64.48%	5,759,621,154	66.12%	2,624,028,952	75.44%	2,266,935,470	
3	1	1	2	1	3		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Peningkatan Perumahan yang dilayani Utilitas Umum					82%	27,618,191,428	88%	26,431,830,096	94%	24,589,824,339	

NOMOR						Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			Tahun 2023	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
3	1	1	2	1	4	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan					0%	0	20%	22,619,495	50%	0	
3	1	1	3			Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan	Cakupan Layanan Infrastruktur Perkotaan					56.38%		63.31%		67.09%		DPUPR
3	1	1	3	1	1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rasio Cakupan Pelayanan Air Minum					71.39%	57,782,580,000	73.39%	4,959,426,420	75.39%	5,000,000,000	DPUPR
3	1	1	3	1	2	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rasio Cakupan Sarana dan Prasarana Persampahan					79.87%	2,406,837,550	84.49%	741,285,025	88.72%	741,000,000	
3	1	1	3	1	3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rasio Cakupan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah					3.85%	6,583,728,790	4.05%	6,130,594,552	6.01%	11,575,000,000	
3	1	1	3	1	4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rasio Sistem Jaringan Drainase dalam Kondisi Baik					47.37%	1,297,304,490	51.26%	1,361,367,500	56.39%	1,370,000,000	
3	1	1	3	1	5	Program Pengembangan Permukiman	Rasio Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik					84%	56,064,546,320	86.52%	49,657,731,455	89.12%	49,217,000,000	
3	1	1	3	1	6	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik					61.46%	294,873,827,740	68.44%	75,067,234,212	76.39%	130,527,931,498	
3	1	1	3	1	7	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rasio Bangunan dan Lingkungan dalam Kondisi Baik					17.52%	131,752,099,600	48%	6,000,118,836	49.49%	6,757,494,242	
3	1	1	3	1	8	Program Penyelenggaraan Jalan	Rasio Jalan Status Kota dalam Kondisi Mantap					85.55%	51,575,765,250	90.37%	89,022,000,000	95.00%	47,100,000,000	
3	1	1	3	1	9	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Peningkatan Kualitas Jasa Konstruksi ke-PU an					15.09%	2,484,277,857	23.64%	1,950,000,000	53%	1,950,000,001	
3	1	1	3	1	10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rasio Ketaatan Terhadap Tata Ruang					75.00%	4,585,999,757	80.00%	1,947,562,000	85%	1,999,999,997	
3	1	1	4			Penurunan Luasan Kawasan Genangan	Luasan Kawasan Genangan			1314 Ha		1013 Ha		860 Ha		711 Ha		DPUPR
3	1	1	4	1	1	Program Pengelolaan Sumber Dava Air (SDA)	Persentase Pengelolaan Sumber Dava Air (SDA)					52.76%	32,291,938,320	54.19%	28,251,115,000	55.62%	28,500,000,000	DPUPR

NOMOR							Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			Tahun 2023	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
								Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	52.06		52.39		52.57		55.2		55.5	DLH	
3	1	2	1				Meningkatkan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	37.75		38.3		39.75		39.9		40.05	DLH	
3	1	2	1	1	1		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Kesesuaian Perencanaan Lingkungan Hidup Dengan RPJM				100%	296,839,855	100%	14,776,080	100%	3,747,750	DLH	
3	1	2	1	1	2		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase orang atau lembaga yang mendapatkan fasilitas pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup				100%	215,854,234	100%	166,540,000	100%	12,450,000		
3	1	2	1	1	3		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Status mutu air sungai dan danau Kota Jambi				7 Nilai	1,622,806,723	7 Nilai	1,633,324,457	7 Nilai	1,188,135,732		
								Indeks Kualitas Udara	80.7		80.72		80.74		80.76		80.78	DLH	
3	1	2	1	2	1		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan				0.06%	7,286,865,621	0.06%	7,465,489,900	0.06%	6,411,836,970	DLH	
3	1	2	1	2	2		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)				100%	31,393,550	100%	52,382,193	100%	113,640,510		
								Indeks Kualitas Tutupan Lahan	41.3		41.7		44.85		44.87		44.9	DLH	
3	1	2	1	3	1		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)				20%	199,704,960	25%	344,011,111	30%	188,563,000	DLH	
3	1	2	1	3	2		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup				0	0	0	0	100%	0		
3	1	2	1	3	3		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup				100%	26,739,900	100%	123,060,201	100%	75,590,000		

NOMOR						Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			Tahun 2023	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
3	1	2	1	3	4	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan					90.98%	35,785,928,643	90.98%	32,151,754,977	92%	31,249,079,872	
MISI 4 : Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan																		
4	1					Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5.28		5.39		2.75- 3.25		3.25-4.25		4.25-5.25		DPP, DPKP, DPK, BPPRD, BPKAD, DPMPTSP DPP
4	1	1	1			Pengendalian Laju Inflasi Kota Jambi	Laju Inflasi					3.00- 3.75		3.00-4.10		3.10-4.20		
4	1	1	1	1	1	Program Pengembangan Ekspor	Presentase pengembangan ekspor					41.67%	91,575,335	70.83%	337,000,000	100%	96,813,442	DPP
4	1	1	1	1	2	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase penggunaan pemasaran produk dalam negeri					60.87%	910,999,748	80.43%	1,130,000,000	100%	837,235,139	
4	1	1	1	1	3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan					66%	2,066,560,398	66%	2,430,000,000	100%	1,366,319,643	
4	1	1	1	1	4	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase fasilitasi perizinan dan pendaftaran perusahaan					66%	137,236,284	66%	134,835,000	100%	96,479,710	
4	1	1	1	1	5	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok dan barang penting					66%	688,236,841	66%	934,250,000	100%	513,416,530	
4	1	1	1	1	6	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase standarisasi dan perlindungan konsumen					58.98%	163,225,168	79.49%	245,000,000	100%	145,305,957	
4	1	1	2			Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan					78		80		82		DPKP
4	1	1	2	1	1	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya					2.536 Ton	355,000,000	2.586 Ton	375,000,000	2.638 Ton	380,000,000	DPKP
4	1	1	2	1	2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum Daratan (PUD) Sungai Danau dan Rawa					600 Ton	75,000,000	680 Ton	80,000,000	680 Ton	70,000,000	
4	1	1	2	1	3	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan Produksi Produk Perikanan bernilai Tambah/Produksi Olahan Hasil Perikanan					1868 Ton	125,000,000	1887 Ton	130,000,000	1906 Ton	80,000,000	

NOMOR						Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			Tahun 2023	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
4	1	1	2	1	4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penurunan Daerah Rawan Pangan					40%	160,000,000	60%	200,000,000	80%	125,000,000	
4	1	1	2	1	5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Tingkat Keamanan Pangan Segar					85%	163,000,000	85%	538,000,000	85%	358,600,000	
4	1	1	2	1	6	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan					88.80	1,050,000,000	91.00	1,100,000,000	93.10	380,000,000	
4	1	1	2	1	7	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pertanaman Aman dari Serangan OPT dan DPI (Dampak Perubahan Iklim)					80%	135,000,000	85%	135,000,000	90%	94,736,819	
4	1	1	2	1	8	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pengendalian penyakit hewan dan penjaminan pangan asal hewan yang ASUH					75%	588,000,000	75%	647,500,000	75%	555,000,000	
4	1	1	2	1	9	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase penambahan pembangunan prasarana (Pembangunan Screen House)					40%	184,000,000	60%	56,000,000	80%	135,333,649	
4	1	1	2	1	10	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Laju Peningkatan Produktivitas Pertanian					20%	665,000,000	20%	820,000,000	20%	550,000,000	
4	1	1	2	1	11	Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatkan Produktivitas Tanaman Pangan					2%	305,000,000	2%	340,000,000	2%	350,000,000	
4	1	1	3			Meningkatkan Aktivitas Pariwisata	Peningkatan Kunjungan Wisatawan					600 Org		650 Org		700 Org		DPK
4	1	1	3	1	1	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pengembangan Kebudayaan					35%	994,285,196	35%	1,098,626,823	35%	665,096,026	DPK
4	1	1	3	1	2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional					35%	149,645,130	0%	97,296,190	30%	0	
4	1	1	3	1	3	Program Pembinaan Sejarah Kota Jambi	Cakupan Pembinaan Sejarah Kota Jambi					35%	24,000,000	35%	34,087,540	35%	81,031,336	
4	1	1	3	1	4	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Objek Daya Tarik Destinasi Wisata					30%	1,440,428,932	25%	1,215,743,592	20%	705,665,406	
4	1	1	3	1	5	Program Pemasaran Pariwisata	Cakupan Pemasaran Pariwisata					30%	923,251,860	25%	1,201,391,091	25%	754,369,434	
4	1	1	3	1	6	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					35%	250,079,626	25%	444,493,910	20%	687,722,983	

NOMOR							Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
4	1	1	3	1	7	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual					0%	0	0%	0	50%	0		
4	1	1	4			Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	8%		9%		9%		9%		9%		BPPRD	
4	1	1	4	1	1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah					100%	25,409,284,284	100%	26,776,300,000	100%	7,872,445,394	BPPRD	
4	1	1	5			Meningkatkan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	430.5 M		430.5 M		474.62 M		498.35 M		523.37 M		DPMPSTP	
4	1	1	5	1	1	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan					84	892,232,389	85	759,373,300	85.5	827,691,598	DPMPSTP	
4	1	1	5	1	2	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Terselenggaranya Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Terintegrasi Secara Elektronik					100%	65,999,620	100%	72,599,582	100%	47,264,133		
4	1	1	5	1	3	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Peningkatan jumlah Investor berskala Nasional yang berinvestasi di Kota Jambi					2 investor	94,574,800	2 investor	219,180,800	2 investor	71,570,717		
4	1	1	5	1	4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Ketaatan Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal oleh Investor (LKPM)					10%	533,747,577	10%	454,835,553	10%	458,840,289		
4	1	1	5	1	5	Program Promosi Penanaman Modal	Peningkatan Jumlah Calon Visitor (Pengunjung					10%	454,304,746	10%	233,758,660	10%	272,536,996		
4	1	1	6			Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	6.56		6.42		10.37		9.8		9.3		DTKK	
4	1	1	6	1	1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam RTKD							100%	49,539,800	100%	0	DTKK	
4	1	1	6	1	2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Dilatih dan Bekerja					60%	470,069,199	100%	470,069,199		339,892,113		
4	1	1	6	1	3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja yang Terdaftar					42%	201,543,806	100%	201,543,806		92,044,706		

NOMOR						Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			Tahun 2023	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
4	1	1	6	1	4	Program Hubungan Industrial	Persentase Penyelesaian Perselisihan HI dengan Perjanjian Bersama					58%	329,033,968	100%	329,033,968		228,939,088	
4	1	1	7			Meningkatkan Daya Saing Usaha Skala mikro dan Kecil	Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	8.08%		8.54%		9.01%		9.47%		9.94%		DTKK
4	1	1	7	1	1	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Cakupan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam					8%	39,999,870				0	DTKK
4	1	1	7	1	5	Program Pemberdayaan Usaha menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang Berpotensi Menjadi Usaha Mikro Berkualitas					30%	202,889,976	9,42%	493,841,379	15,71%	230,328,673	
4	1	1	7	1	6	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil					20%	143,678,430				0	
							Persentase Daya Saing Produk IKM	4.30%		5.35%		6.50%		7.50%		8.30%		DPP
4	1	1	7	2	1	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase pengelolaan sistem informasi industri					66%	123,965,259	66%	144,315,159	100%	45,244,513	DPP
4	1	1	7	2	2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian izin usaha industri					66%	106,074,800	66%	150,000,000	100%	56,526,586	
4	1	1	7	2	3	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase perencanaan dan pembangunan industri					66%	536,596,346	66%	632,000,000	100%	684,894,794	
							Persentase koperasi berkualitas	16.06%		19.27%		23.85%		22.82%		36.70%		DTKK
4	1	1	7	3	1	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP yang Sehat					37.50%	20,178,154	37.70%	33,443,984	44.50%	0	DTKK
4	1	1	7	3	2	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pengurus Koperasi yang Berkompetensi					14%	539,282,212	45%	252,904,515	54.50%	138,213,366	
4	1	1	7	3	3	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Omset Koperasi					22%	122,742,000	5%	220,698,681	5%	71,980,726	
MISI 5 : PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT PERKOTAAN																		

NOMOR							Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			Tahun 2023	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
5	1						Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	77.14		77.54		78.39		79.15		79.20		DISDIK, DINKES, DPPKB, DAN OPD DINKES
5	1	1	1				Meningkatkan Derajat Kesehatan	Umur Harapan Hidup (UHH)	72.35		72.35		72.73		72.81		72.89		
5	1	1	1	1	1	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase indikator SPM Bidang Kesehatan yang mencapai >90%					100%	58,589,230,557	100%	99,148,720,929	100%	35,646,434,511	DINKES
5	1	1	1	1	1	2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kopetensi sumberdaya manusia kesehatan yang sesuai standar					100%	349,556,917	100%	595,000,000	100%	159,999,911	DINKES
5	1	1	1	1	1	3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase pengawasan untuk sarana produksi alkes, PKRT dan UMOT					100%	368,537,970	100%	465,000,000	100%	125,695,373	DINKES
5	1	1	1	1	1	4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan					100%	389,055,991	100%	390,461,590	100%	136,068,715	DINKES
5	1	1	2				Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14.6		14.61		15.11		15.38		15.39		DISDIK
5	1	1	2	1	1		Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya APM 1. PAUD 2. KESETARAAN 3. SD 4. SMP					14,62	142.058.880.134	14,63	118,030,599,568	14,64	41,842,189,892	DISDIK
5	1	1	2	1	2		Program Pengembangan Kurikulum	Meningkatnya Kompetensi Peserta Didik terhadap Keaarifan Lokal					12,32	319.380.058	8,32	28,932,680	4,32	28,929,862	DISDIK
								Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10.68		10.69		10.93		11.21		11.22		DISDIK
5	1	1	2	2	1		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan					10,70	81,656,000	10,71	81,656,000	10,72	79,392,800	DISDIK
5	1	1	2	2	2		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Tertib Pengelolaan Perizinan Pendidikan					100%	33.164.585	100%	137,241,395	100%	158,477,687	DISDIK
5	1	1	2	2	3		Program Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya Jumlah Perpustakaan yang memenuhi SNP					-	0	2 Perpustakaan	1,245,184,235	2 Perpustakaan	789,616,659	DPK

NOMOR						Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			Tahun 2023	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
5	1	1	2	2	4	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Jumlah naskah Kuno yang dilestarikan					-	0	1 Naskah	56,827,020	1 Naskah	54,576,268	DPK
5	1	1	3			Mengendalikan angka Kelahiran Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1.05		1.05		1.03		1.03		1.01		DPPKB
5	1	1	3	1	1	Program Pengendalian Penduduk	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Pengendalian Penduduk					11 Data	245,713,237	11 Data	220,428,139	11 Data	123,898,001	DPPKB
5	1	1	3	1	2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan Advokasi KIE dan Penggerakan Lini Lapangan Ratio Akseptor KB					100%	4,494,642,464	100%	1,497,314,800	100%	1,549,404,999	DPPKB
							Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera	96.23%		96.46%		96.69%		96.92%		97.15%		DPPKB
5	1	1	3	2	1	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga					68%	1,058,933,099	32%	151,977,358	51%	126,460,000	DPPKB
							Indeks Pembangunan Gender	94.90		94.91		94.40		94.45		95.0		DPMPPA
5	1	2	1			Meningkatkan Kesetaraan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	68.10		68.20		68.30		68.40		68.50		DPMPPA
5	1	2	1	1	1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase peningkatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan					94.20%	715,349,070	94.20%	715,349,070	94.20%	654,765,683	DPMPPA
5	1	2	1	1	2	Program Perlindungan Perempuan	Penurunan Rasio KDRT					0.020	485,107,261	0.019	533,617,987	0.017	146,305,300	DPMPPA
5	1	2	1	1	3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan keluarga berkualitas					30%	177,149,200	35%	177,149,200	40%	191,508,280	DPMPPA
							Kriteria Kota Layak Anak	Madya		Nindya		Madya		Nindya		Nindya		DPMPPA
5	1	3	1			Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	Persentase Hak Anak yang Terpenuhi	70%		80%		70%		80%		80%		DPMPPA
5	1	3	1	1	1	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Nilai Indeks Pembangunan Keluarga					30%	168,951,590	35%	185,846,749	40%	0	DPMPPA

NOMOR							Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			Tahun 2023	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
5	1	3	1	1	2	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak (PHA)					80%	305,283,114	90%	335,811,425	100%	298,626,759	DPMPPA	
5	1	3	1	1	3	Program Perlindungan Khusus Anak	Penurunan Rasio Kekerasan Terhadap Anak					0.054	571,677,622	0.052	628,845,384	0.05	267,678,308		
5	1	3	1	1	4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Cakupan data Gender dan anak					20%	282,101,590	25%	282,101,590	30%	267,409,952		
							Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	60.23%		61.43%		63.00%		88%		89%		DPMPPA, KECAMATAN, DISPORA	
5	1	4	1			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	60.2%		61.43%		87.0%		88%		89%		DPMPPA, KECAMATAN	
5	1	4	1	1	1	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat					70%	4,744,445,907	71%	4,744,445,907	73%	4,082,157,267	DPMPPA	
5	1	4	1	1	2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat yang dibina dikelurahan					65%	3,615,277,600	70%	3,976,805,360	75%	3,530,768,938	Kecamatan Kota Baru	
5	1	4	1	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat dikelurahan					85%	1,492,387,460	86%	1,598,633,005	87%	2,986,824,315	Kecamatan Telanaipura	
5	1	4	1	1	4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat dikelurahan					60%	8,262,070,000	70%	9,088,000,000	80%	3,646,106,956	Kecamatan Jelutung	
5	1	4	1	1	5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat dikelurahan					80%	3,682,458,400	82%	4,050,704,240	84%	1,406,991,922	Kecamatan Pasar	
5	1	4	1	1	6	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat dikelurahan					82%	4,001,909,301	83%	4,402,100,231	84%	3,059,679,000	Kecamatan Jambi Selatan	
5	1	4	1	1	7	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat yang di kelurahan					60%	2,393,995,661	70%	2,753,095,010	80%	4,247,497,430	Kecamatan Jambi Timur	
5	1	4	1	1	8	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat dikelurahan					72.72%	2,656,307,868	72.72%	2,921,938,654	72.72%	1,579,162,790	Kecamatan Danau Teluk	

NOMOR						Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			Tahun 2023	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
5	1	4	1	1	9	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat dikelurahan					80%	3,660,322,107	83%	4,026,354,300	86%	1,439,369,706	Kecamatan Pelayangan
5	1	4	1	1	10	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat dikelurahan					61.11%	1,442,759,800	72.22%	1,615,145,800	88.88%	3,664,055,013	Kecamatan Alam Barajo
5	1	4	1	1	11	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat dikelurahan					80%	3,615,277,600	81%	3,976,805,360	82%	3,311,966,981	Kecamatan Danau Sipin
5	1	4	1	1	12	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kelembagaan masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan					63%	1,226,217,720	64%	1,613,335,270	66%	4,606,941,457	Kecamatan Paal Merah
5	1	4	1	1	13	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian kasus terkait ketentraman dan ketertiban umum					100%	146,130,500	100%	160,743,550	100%	56,108,500	Kecamatan Kota Baru
5	1	4	1	1	14	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan lingkungan yang aman dan kondusif					86%	81,983,760	88%	85,200,000	90%	186,148,320	Kecamatan Telanaipura
5	1	4	1	1	15	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan lingkungan yang aman dan kondusif					35%	148,800,000	45%	164,000,000	55%	92,156,351	Kecamatan Jelutung
5	1	4	1	1	16	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan lingkungan yang aman dan kondusif					85%	47,044,070	86%	51,748,477	87%	290,985,100	Kecamatan Pasar
5	1	4	1	1	17	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan lingkungan yang aman dan kondusif					90%	161,383,600	91%	177,521,960	92%	108,840,000	Kecamatan Jambi Selatan
5	1	4	1	1	18	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan lingkungan yang aman dan kondusif					100%	84,557,500	100%	97,241,125	100%	77,388,800	Kecamatan Jambi Timur
5	1	4	1	1	19	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan lingkungan yang aman dan kondusif					25%	91,710,800	50%	100,881,880	75%	27,375,000	Kecamatan Danau Teluk
5	1	4	1	1	20	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan lingkungan yang aman dan kondusif					60%	832,486,980	65%	915,735,700	70%	152,406,400	Kecamatan Pelayangan
5	1	4	1	1	21	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan lingkungan yang aman dan kondusif					40%	14,874,250	60%	161,124,900	80%	152,946,700	Kecamatan Alam Barajo

NOMOR						Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			Tahun 2023	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
5	1	4	1	1	22	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan lingkungan yang aman dan kondusif					85%	146,130,500	86%	160,743,550	87%	399,621,773	Kecamatan Danau Sipin
5	1	4	1	1	23	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan lingkungan yang aman dan kondusif					100%	41,202,500	100%	295,298,436	100%	48,714,800	Kecamatan Paal Merah
5	1	4	1	1	24	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum					100%	311,794,080	100%	342,973,488	100%	259,560,135	Kecamatan Kota Baru
5	1	4	1	1	25	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum					80%	320,899,450	81%	400,434,500	82%	646,841,486	Kecamatan Telanaipura
5	1	4	1	1	26	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum					100%	669,000,000	100%	735,000,000	100%	1,287,213,068	Kecamatan Jelutung
5	1	4	1	1	27	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum					81%	634,539,671	83%	697,993,638	85%	209,691,800	Kecamatan Pasar
5	1	4	1	1	28	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum					79%	465,984,539	80%	512,582,993	81%	21,650,981	Kecamatan Jambi Selatan
5	1	4	1	1	29	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum					100%	755,975,094	100%	869,371,358	100%	102,516,355	Kecamatan Jambi Timur
5	1	4	1	1	30	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum					60%	1,332,879,813	70%	1,466,167,794	80%	273,298,214	Kecamatan Danau Teluk
5	1	4	1	1	31	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum					75%	555,651,129	79%	611,216,250	83%	337,498,480	Kecamatan Pelayangan
5	1	4	1	1	32	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum					50%	152,850,610	62.5%	325,554,200	75%	349,372,253	Kecamatan Alam Barajo
5	1	4	1	1	33	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum					80%	311,794,080	82%	342,973,488	84%	134,754,398	Kecamatan Danau Sipin
5	1	4	1	1	34	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum					100%	431,938,600	100%	353,968,001	100%	212,454,872	Kecamatan Paal Merah

NOMOR						Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			Tahun 2023	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
5	1	4	2			Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	50		50.5		57.9		57.95		58		DISPORA
5	1	4	2	1	1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda Pelopor					65%	1,164,212,000	75%	1,397,054,400	83%	1,571,001,500	DISPORA
							Persentase wirausaha muda Pemula					75%	43,459,000	78%	52,150,800	80%		
							Persentase OKP yang Aktif					64%	56,107,000	86%	67,328,400	93%		
5	1	4	2	1	2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Masyarakat Gemar Berolahraga					31%	238,510,000	62%	298,125,000	87%		
							Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi					78%	5,032,340,000	80%	5,132,340,000	82%	10,204,625,000	
5	1	4	2	1	3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Gudep yang Dibina					25%	471,401,900	50%	416,924,099	80%	1,302,045,833	
							Persentase Anggota Pramuka yang Dibina					25%	750,000,000	0%	640,081,572	70%		
							Persentase Penduduk Miskin	8.49		7.89		7.29		9.0		8.9		DINSOS
5	1	5	1			Menurunkan angka PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	65%		70%		70%		75%		80%		DINSOS
5	1	5	1	1	1	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemberdayaan Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Menangani PMKS					100%	1,579,491,570	100%	1,579,491,570	100%	1,649,263,770	DINSOS
5	1	5	1	1	2	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan					100%	85,408,330	100%	85,408,330	100%	53,099,000	
5	1	5	1	1	3	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial yang di layani					100%	1,382,638,800	100%	1,382,638,800	100%	1,300,831,950	
5	1	5	1	1	4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Perlindungan dan Jaminasn Sosial PMKS Terlayani					100%	990,000,000	100%	990,000,000	100%	336,460,675	
5	1	5	1	1	5	Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Bencana saat tanggap darurat					100%	737,756,000	100%	737,756,000	100%	712,680,370	

